



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke : 5
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2020
Waktu : 10.30 s.d. 13.30 WIB
Tempat : Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
- Ketua Rapat : Sudin, SE. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP)
Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019;
2. Subsidi Pangan pada APBN Tahun Anggaran 2021;
3. Isu-isu Aktual.
- Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
dari 44 orang 55 Anggota Komisi IV DPR RI dengan rincian:
- 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)**
9 dari 12 orang Anggota
 1. Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. H. Sunarna, S.E., M.Hum.
 3. Ir. Effendi Sianipar
 4. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
 5. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
 6. Drs. I Made Urip, M.Si.
 7. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
 8. Maria Lestari, S.Pd.
 9. Riezky Aprilia, S.H., M.H.
 - 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)**
6 dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
3. Budhy Setiawan
4. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
5. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
6. Alien Mus

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

7 dari 7 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
4. Renny Astuti, S.H., S.P.N.
5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess, M.Sc.
6. Ir. T. A. Khalid, M.M.
7. Dr. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

5 dari 6 orang Anggota

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. Sulaeman L. Hamzah
3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
4. H. Charles Meikyansah
5. Julie Sutrisno

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

4 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
4. Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
4. Muslim, S.Hl., M.M.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

4 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
3. H. Johan Rosihan, S.T.
4. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag., M.H.
2. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
3. Slamet Aryadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Ema Umiyyatul Chusnah

A. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Budi Waseso (Direktur Utama Perum Bulog);
2. Gatot Trihargo (Wakil Direktur Utama Perum Bulog);
3. Tri Wahyudi Saleh (Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog);
4. Bachtiar (Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog);
5. Wibisono Poespithohadi (Direktur Pengadaan Perum Bulog);
6. Bagya Mulyanto (Direktur SDM dan Umum Perum Bulog);
7. Triyana (Direktur Keuangan Perum Bulog); dan
8. Mansur (Direktur Komersial Perum Bulog).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Direktur Utama Perum BULOG beserta jajarannya,
Serta hadirin yang kami hormati.

Saya minta tolong satu Anggota damping saya Bapak Suhardi Duka silakan. Harus ada yang mendampingi sesuai dengan Tatibnya.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat

rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sudang 2019-2020, yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Bamus pada tanggal 30 April 2020 dan Rpaat Internal Komisi IV DPR RI 17 Juni 2020 pada hari ini kami tanggal 25 Juni 2020, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum Bulog dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2019, subsidi pangan pada APBN Tahun 2021 serta isu-isu aktual lainnya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Rapat Kerja hari ini dibuka dan dinyatakan dibuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Rapat Dengar Pendapat ini dimulai pada pukul 10.30 WIB dan akan diakhiri pada pukul 14.00 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib atau kesepakatan Bersama dengan susunan acara, sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Direktur Utama Perum Bulog;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Direktur Utama Perum Bulog;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sebelum memulai Rapat Dengar Pendapat ini, Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja Perum Bulog yang menyalurkan Bansos Rastra tahun 2019 senilai 351,8 ribu ton atau setara dengan 99,62 dari SPP (Surat Perintah Penyalur), yaitu sebesar 353,1 ribu ton penyaluran CBP, KPSH, Cadangan Beras Pemerintah untuk program ketersediaan pasokan dan stabilitas harga senilai 617,4 ribu ton serta penyaluran CBP (Cadangan Beras Pemerintah) untuk bencana alam sebesar 4,882 ton. Namun, Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan kondisi piutang yang belum dibayar. Jadi Pemerintah ini banyak hutangnya terhadap Bulog dalam penyaluran CBP dan CSHP, harga pangan komoditas gula tahun 2018-2019. Selanjutnya pada Rapat Dengar Pendapat hari ini, Komisi IV DPR RI meminta penjelasan Perum Bulog diantaranya mengenai ketersediaan beras dalam negeri hingga akhir tahun 2020.

Adanya rencana impor beberapa komoditas strategis serta peran Bulog di tengah pandemi COVID-19. Pada Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian beberapa waktu yang lalu Menteri Pertanian melaporkan bahwa produksi beras secara nasional hingga 2020 mendatang diperkirakan masih surplus. Saya tidak tahu hitungannya dari mana mengatakan masih surplus kurang lebih 6,1 juta ton.

Dan akan menjadi *carry over* kebutuhan pangan tahun selanjutnya, yaitu tahun 2021. Selanjutnya diperkirakan ketersediaan beras tersebut didasarkan pada produksi dan kebutuhan konsumsi bulanan serta memperhitungkan stok yang ada. Perkiraan ini kami kurang memperhitungkan beberapa aspek, yaitu peringatan FAO atas perkiraan kemarau panjang atau *El Nino* yang akan mengancam ketahanan pangan negara dan peringatan dari sejumlah negara yang mulai membatasi ekspor pangannya.

Kementerian Pertanian juga mengemukakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga tahun 2020 juga bersumber dari kegiatan impor komoditas strategis seperti daging sapi atau kerbau dan gula pasir. Komisi IV DPR RI juga menilai bahwa seharusnya pada sama pandemi COVID-19 dijadikan momentum untuk memproteksi kesehatan melalui kualitas pangan yang dikonsumsi dan menghentikan kegiatan impor produk pertanian dengan membangkitkan semangat petani dan peternak lokal.

Saat ini FPH dalam kondisi mati suri, karena tingginya jumlah daging sapi dan kerbau yang masuk sehingga melemahkan semangat peternak dan mengubah strategi penjualan yang lebih difokuskan pada pengadaan pasokan hari besar keagamaan, seperti hari raya Idul Adha yang akan segera tiba.

Komoditas gula menjadi sorotan di karenakan adanya kegiatan impor secara bertahap Bersama dengan musim giling yang berlangsung sampai 5 bulan kedepan, sehingga harga di tingkat petani lebih rendah dibandingkan dengan biaya produksi.

Bapak dan Ibu termasuk Dirut Bulog.

Saya bingung kalau bicara 10 tahun lalu saya disini, Kementerian Pertanian menjanjikan mengatakan *Insha Allah* tahun 2014 kita swasembada gula. Tahun 2015 Menteri Pertanian pun mengatakan demikian juga *Insha Allah* 2020 kita swasembada. Setahu saya ada yang namanya swasembada gitinging itu di Medan, kalau swasembada gula saya tidak pernah dengar.

Dalam menjaga ketahanan pangan nasional Komisi IV DPR RI menilai perubahan program beras rasta menjadi bantuan pangan non tunai dan akan ditransformasikan menjadi program sembako. Patut didukung oleh semua pihak, namun dengan menjalankan program tersebut Komisi IV DPR RI menilai bahwa sepatutnya Pemerintah melibatkan Perum Bulog dalam memasok bahan pangan agar tidak terjadi perbedaan mutu maupun kecurangan harga serta rendahnya kualitas komoditas yang digunakan salah satunya adalah komoditi beras. Mencermati kondisi tersebut, Komisi IV DPR

RI akan menggunakan data pelaksanaan anggaran tahun 2019 dan isu aktual sebagai bahan pertimbangan dan pembahasan subsidi pangan pada tahun 2021.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Di tengah pandemi COVID-19, Komisi IV DPR RI juga memberikan apresiasi yang besar terhadap kinerja Perum Bulog dalam rangka perlindungan harga pasar komoditas petani, perlindungan harga pangan di tingkat konsumen, menjaga ketahanan pangan nasional, serta aktif dalam mendistribusikan bantuan social Pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Komisi IV DPR RI menyikapi bahwa Perum Bulog sudah seharusnya ditempatkan sebagai Lembaga, saya tegaskan lagi sebagai Lembaga yang dipercaya untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam melindungi ketahanan pangan nasional khususnya bagi masyarakat yang rawan pangan, sehingga Komisi IV DPR RI meyakini bahwa perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga terkait dengan peran dan tugas Perum Bulog khususnya dalam melindungi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan masyarakat khususnya di masa pandemi COVID-19 ini.

Demikian beberapa hal yang saya sampaikan setelah Dirut Perum Bulog memberikan paparannya saya minta semua Anggota memberikan input yang positif, masukan yang konstruktif terhadap pelaksanaan anggaran 2019 Perum Bulog serta kebijakan subsidi pangan yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021.

Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Di tempat Bapak dan Ibu, pasti ada namanya kabupaten, saya berharap apabila kabupaten menyalurkan Bansos diharapkan ada kerja sama dengan Bulog. Kenapa saya harapkan begitu? Seperti beberapa wilayah di Lampung saya bicara dengan Bupati yang mana kalau kader saya, saya bicara sangat gampang. Apa burgeningnya, Bulog pun harus punya *burgening*. Salah satu contoh, kalau anda ambil beras sama saya kamu butuh gula juga nanti saya akan siapkan. Itu yang terjadi di beberapa kabupaten di Lampung, saya ingatkan ambillah beras sama Bulog tapi juga minta juga gula sama ... Karena saat ini saya tidak tahu di wilayah lain, di Lampung harga gula masih Rp16.200 per kilo di pasar. Sampai ada kata-kata tikus mati di lumbung padi, saya juga berharap Anggota Dewan ini yang hadir hari ini maupun secara virtual untuk mendengarkan ini.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Dirut Perum Bulog untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas.

Kami persilakan.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG (BUDI WASESO):

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Anggota Komisi IV DPR RI.

Memenuhi undangan Wakil Ketua DPR RI Korinbang Nomor AG06775/DPRRI/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal undangan Rapat Dengar Pendapat, Bersama ini kami sampaikan penjelasan Perum Bulog mengenai evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019, Subsidi Pangan pada APBN Tahun Anggaran 2021 dan isu-isu actual lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan penugasan Perum Bulog secara sektoral diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Yang didukung oleh Perpres Nomor 48 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2015. Hal tersebut diperkuat dalam anggaran dasar Perum Bulog, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perum Bulog.

Dalam ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat 3 tujuan utama penugasan kepada Perum Bulog, yaitu yang pertama mengamankan harga produsen sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah atau HPP, Atau penetapan oleh Rakortas. Yang kedua, menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan dalam bentuk Cadangan Pangan Pemerintah atau CBP, serta penyediaan dan distribusi pangan. Dan ketiga, mengamankan harga konsumen sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi atau HET. Dan ini semua keputusan dari Rakortas.

Selanjutnya terkait dengan agenda rapat hari ini, dapat kami sampaikan sebagai berikut, yaitu yang pertama mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2019. Perkembangan penugasan komoditas beras PSO di tahun 2019, Perum Bulog memiliki fungsi menegakkan pilar keterjangkauan yang salah satunya adalah menjalankan penugasan, penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera atau disebut Bansos Rastra. Program Bansos tersebut, menggantikan program subsidi pangan sebelumnya yang dikenal dengan sebutan program Raskin. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 jumlah pagu penyaluran beras PSO tahun 2019 mengalami penurunan secara signifikan seiring dengan peralihan program Bansos Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT.

Realisasi penyaluran Bansos Rastra tahun 2019 hanya sebesar 351.848 ton. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan penyaluran pada tahun 2018, yaitu sebesar 2.207.269 ton. Penurunan pagu tersebut sangat berdampak kepada kinerja keuangan PSO dari Perum Bulog.

Bapak dan Ibu, Pimpinan serta Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Yang berikutnya adalah realisasi penyaluran beras CBP tahun 2019. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah atau CBP tahun 2019 terbagi menjadi dua, yaitu penyaluran CBP untuk ketersediaan pangan dan stabilisasi harga dan penyaluran CBP untuk bencana alam. Realisasi penyaluran CBP atau KPSH di tahun 2019 sebesar 617.482 ton sedangkan untuk realisasi penyaluran CBP bencana alam di tahun 2019 sebesar 4.882 ton.

Sesuai dengan Rakortas Perum Bulog wajib menjaga stock CBP sebesar 1 sampai dengan 1,5 juta ton dengan menggunakan dana pinjaman komersial. Stok tersebut bisa dikeluarkan hanya melalui saluran penugasan seperti Bansos Rastra, KPSH bencana alam. Ketika Bansos Rastra dihilangkan maka stok CBP menumpuk dan menyebabkan beban finansial yang berat bagi Perum Bulog. Demikian juga halnya untuk komoditas gula.

Adapun alokasi pelaksanaan anggaran CBP tahun 2019 mencapai Rp2,5 triliun dengan harga pembelian beras ditetapkan masih sama dengan HPP tahun 2018, yaitu sebesar Rp9.583 per kilo gram. Sedangkan untuk mekanisme pembayaran CBP tahun 2019 dengan pola penggantian selisih harga pada tahun 2020 alokasi dana CBP mencapai Rp2,75 triliun dengan mekanisme pencairan dana sesuai dengan PMK 88/PMK02/2019, yaitu system pola baru selisih harga.

Yang kedua, subsidi pangan pada APBN Tahun Anggaran 2021, Perum Bulog yaitu dalam rangka menentukan jumlah ideal Cadangan Beras Pemerintah dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut FAO ratio antara jumlah persediaan beras terhadap kebutuhan konsumsi yang aman berkisar antara 17 sampai dengan 18% dari subsidi nasional atau sebesar 5 sampai 6 juta ton. Yang kedua, berdasarkan kajian BPKP Kementerian Pertanian tahun 2013 jumlah stok CBP yang aman berada pada level 1,52 sampai 1,8 juta ton. Yang ketiga, sesuai hasil Rakortas tanggal 28 Maret dan 27 Agustus 2018 jumlah CBP yang dikelola berkisar 1 sampai 1,5 juta ton sampai dengan saat ini jumlah stok yang dikelola Perum Bulog mengikuti keputusan Rakortas tersebut.

Bapak dan Ibu Pimpinan serta Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Harga Pembelian Beras tahun 2021 yang diajukan kepada Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp10.801 per kilo gram dengan asumsi penyaluran CBP tahun 2021 sebanyak 1,5 juta ton. Harga jual CBP sebesar Rp8.100 per kilo gram, maka total kebutuhan anggaran subsidi beras tahun 2021 adalah sebesar Rp4,051 triliun. Anggaran tersebut mengacu kepada pola subsidi dalam PMK Nomor 88 Tahun 2019.

Perum Bulog juga telah mengajukan usulan dana pengadaan beras CBP untuk 1,5 juta ton sebesar Rp15 triliun untuk disediakan dalam APBN tahun 2021. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka total anggaran pangan dalam APBN 2021 diusulkan sebesar Rp19,051 triliun.

Yang berikutnya masalah kendala pelaksanaan kebijakan pangan. Pada kesempatan kami ingin menyampaikan kendala yang dihadapi terkait

dengan pelaksanaan kebijakan pangan antara lain, yaitu yang pertama penugasan kepada Perum Bulog bersifat Ad hoc tanpa jaminan *contiunitas*. Yang kedua, penugasan belum terintegrasi antara Kementerian dan Lembaga. Yang ketiga, belum lengkapnya kebijakan turunan dari Perpres Nomor 48 Tahun 2016 yang seharusnya didukung dengan Peraturan Menteri. Oleh karena itu, kami berharap mendapatkan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, dari Ketua, Anggota Komisi IV DPR RI agar pelaksanaan kebijakan pangan yang telah diamanatkan kepada Perum Bulog dapat berjalan dengan baik.

Demikian yang bisa kami sampaikan, atas perhatian dan dukungan Bapak dan Ibu sekalian, Pimpinan Komisi IV DPR RI yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan.

Selanjutnya kami persilakan pada Anggota Komisi IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atau kritik atau saran. Kami persilakan yang pertama Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Bapak Buwas dan Bapak-bapak lain yang hadir, Juga Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Terima kasih untuk paparannya yang sudah disampaikan dengan sangat baik Bapak Dirut Perum Bulog tentu kita, Bapak Buwas, Bapaknya Bulog deh. Tentu kita semuanya dalam situasi yang bisa sangat memahami yang dihadapi oleh Bulog dalam situasi yang sekarang. Tidak ada pandemi saja ada kompleksitas yang luar biasa yang dihadapi persoalan kelembagaan, soal kewenangan dan lain-lain yang juga tidak clear yang membuat kemudian langkah-langkah Bulog dibidang nyerimpetin banyak. Jadi kakinya ada banyak yang gangguin, tapi dengan adanya situasi pandemi ini kemudian ada penugasan kepada Bulog dan Bulog bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan sangat baik. Saya kira saya ingin menegaskan seperti yang dulu pernah saya sampaikan Pimpinan, bahwa kenapa ini tidak kita jadikan momentum untuk kemudian menata ulang seluruh system pangan dan politik pangan kita yang mungkin ini kita ketemu momentumnya.

Ketika Bulog bisa melakukan kerja-kerjanya yang ditugaskan kepada Bulog dalam situasi dimana banyak skeptisme selama pandemi nanti ada kekacauan pasokan, distribusi dan lain sebagainya ternyata mau tidak mau harus kita akui kita dalam situasi yang baik tidak ada misalnya antrian yang

panjang seperti yang terjadi di negara lain, karena ada pasokan yang tidak jelas, apalagi sampai kemudian ketiadaan pasokan. Tapi ternyata kita mampu menghadapi situasi itu.

Yang ingin saya tekankan juga Pak Buwas, bahwa urusan pangan tentu membutuhkan komitmen politik yang sangat kuat dari negara tidak bisa urusan pangan itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Kalau misalnya ada monopoli maka disinilah sebenarnya negara itu punya kuasa itu, karena yang lain sudah mengalami liberalisasi tetapi urusan pangan hampir di semua negara juga memiliki komitmen yang sangat kuat. Negara yang *se-champions* Amerika saja itu yang namanya kelembagaan pangannya justru-justru sangat *power full* karena apa? Karena menyangkut sekian ratus juta warga negaranya, sehingga kepentingan negara untuk penguasaan pangan ini yang diutamakan. Kita menginginkan yang sama di negara kita karena kita tidak ingin seperti dulu yang Bapak Buwas pernah sampaikan bahwa mungkin di atas 90% sebenarnya pangan kita dikuasai oleh mafia.

Nah, apakah kemudian menurut pengalaman Bapak Buwas di masa COVID ini yang namanya kerja-kerja mafia itu juga ternyata masih cukup punya keleluasaan untuk mengatur dan juga mengasuai sektor pangan kita. Apalagi kemudian setelah adanya Perpu dan kemudian Undang-Undang COVID jadi semua hal itu dimungkinkan tanpa ada mekanisme yang normal sebagaimana hari-hari diluar COVID, sehingga mungkin ada pembebasan termasuk impor dan lain sebagainya. Nah, disisi lain mungkin itu bisa mengamankan ketersediaan pangan akan tetapi disisi lain ada ancaman juga gitu. Ini saya perlu bertanya kepada Bapak Buwas.

Kemudian yang kedua Bapak Buwas, setelah kunjungan juga di beberapa titik ada pertanyaan dari masyarakat termasuk juga sebenarnya personil Bulog yang ada di daerah. Sekian lama Bulog itu tidak menyerap gabah, kenapa Bulog itu tidak menyerap gabah dan hanya beras saja. Apakah dimungkinkan Bulog itu kembali menyerap gabah tentu dengan harga yang di atas HPP sekarang, karena disitulah para tengkulak dan juga mafia-mafia kecil yang ada di daerah itu memainkan perasaannya petani dan mereka hadir lebih cepat daripada negara dengan menawarkan harga yang konon katanya lebih bagus tapi sebenarnya karena mereka sudah ngutangin lebih dulu. Nah, kalau kemudian gabah itu yang diserap sebenarnya kekuatan dan daya tahan juga akan lebih bagus daripada ketika hanya menyerap beras. Dalam jangka Panjang menurut saya ini bisa mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan kalau situasi kita sedang dalam masa darurat.

Yang terakhir, terkait dengan kendala pelaksanaan kebijakan pangan. Semua yang disampaikan oleh Bapak Buwas sebenarnya juga sudah pernah kita respon bahwa kita ini ingin memberikan dukungan kepada Bulog bagaimana caranya agar secara kelembagaan itu memang kuat apalagi kita ini sudah punya Undang-Undang pangan yang ini memang membutuhkan *political wheel* dari Presiden terutama untuk bisa eksekusi. Tetapi kita sekali lagi pertanyakan kepada Bapak Buwas, apakah memang badan pangan itu adalah bentuk yang paling ideal yang seharusnya ini segera kita putuskan tetapi kan bukan DPR RI lagi Pak Pimpinan yang memutuskan karena

Undang-Undangnya sudah ada, ini tangannya ada di Pemerintah. Tetapi mekanisme dan prosedur apa yang memungkinkan agar kemudian kita bisa mendesak ini. Kalau kemudian badan pangan sesuai dengan Undang-Undang itu tidak bisa dilakukan ada cara lain apa yang memungkinkan kemudian secara kelembagaan Buwas bisa melakukan baik itu penugasannya, kemudian juga kewenangannya sehingga bukan hanya sekedar Ad Hoc.

KETUA RAPAT:

Cukup Mbak Luluk?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Yang terakhir sekali Bapak Pimpinan, ada juga usulan misalnya kalau misalnya selama ini penugasan dari Bulog itu untuk menyerap beras dan seterusnya tetapi tidak ada kepastian untuk penyalurannya itu TNI/Polri selama ini di suplai dari mana, kemudian ASN dari mana. Minimal kalau ada 3 ini kemudian yang dipastikan mereka yang bisa menyerap berasnya Bulog apalagi plus 9 bahan kebutuhan pokoknya yang lain, maka sebenarnya kompleksitas dan kerumitan yang dialami oleh Bulog itu bisa terurai lebih baik. Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

*Wallahu Muwafiq Illa Aqwamithariq,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Kalau sampai Badan Pangan Nasional dibentuk, PP-nya selesai banyak yang terganggu. Bukan gitu Bapak Dirut?

Selanjutnya Bapak Hansi Lema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi.*

Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat,
Yang terhormat Bapak Buwas dan jajaran Pimpinan di Bulog.

Yang pertama Bapak Buwas, saya mau memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bulog yang telah terlibat nyata dalam menyalurkan beras kepada masyarakat terutama selama pandemi ini Pak. Saya kira ini kita harus angkat jempol kepada Bulog di bawah Bapak Buwas ini positif.

Yang kedua, menyambung apa yang dikatakan oleh Mbak Luluk persoalan mafia Pak. Kami juga meminta konsistensi untuk menindak tegas mafia pangan ini ya terutama terkait dengan beras dan kebutuhan pokok Pak, jangan sampai nanti ada peribahasa itu sudah jatuh tertimpa tangga pula Pak, rakyat sudah susah di pandemi ini terus dikerjain lagi oleh mafia. Karena itu, butuh ketegasan Pak.

Yang berikutnya, di presentasi ini tadi saya sempat membaca bahwa Bulog masih akan juga mengimpor sejumlah produk pangan tetapi belum ada rinciannya itu seperti apa produk pangannya itu apa saja Pak, besarnya bagaimana. Saya ingin mendapatkan penjelasan itu, kemarin ketika diskusi Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Komisi IV DPR RI menegaskan tentang pentingnya produksi produktifitas pertanian kita sehingga kemudian kita tidak terus tergantung kepada pasokan pangan impor.

Bapak Buwas dalam situasi pandemi seperti ini negara-negara di dunia itu kemudian menahan produk-produk pangan mereka melakukan politik otarkis dan dengan demikian tentu ini berdampak kepada kebutuhan nasional kita. Nah, ini bagaimana kita saya ingin mendapatkan gambaran kordinasi dengan Lembaga-lembaga terkait mungkin Kementerian Pertanian, Pedagangan dan sebagainya Pak, karena terus terang kita ini bicara akhirnya mohon maaf pada hal-hal yang remeh temeh Pak, sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita tidak pernah keluar dari akar persoalan bangsa kita itu Pak, saya itu sampai hari ini bertanya betul tidak kita itu mau sampai kapan kita impor terus Pak. Impor beras, impor bawang, impor daging ini mau sampai kapan. Nah, kalau tidak mau terus menerus ya memang harus ada kebijakan walaupun saya tahu itu bukan sepenuhnya tugas Bapak, tapi ya mungkin perlu juga disuarakan Pak.

Yang terakhir Pak, saya baca di slide bagian akhir disitu digambarkan katanya masih ada kendala dalam kebijakan pangan dan salah satu kendalanya itu terkait dengan penugasan penyerapan, tetapi dananya ini juga tidak jelas Pak. Nah, yang dimaksudkan dengan kendala ini terkait dengan relasi ataupun hubungan dengan Pemerintah, Pemerintahnya itu yang mana Pak, saya ingin tahu mendapatkan penjelasan itu.

Bapak Ketua, sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Hansi Lema.

Selanjutnya Ibu Nur'aeni.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Baik, terima kasih Bapak Ketua.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Ketua Komisi beserta Anggota,
Bapak Buwas beserta jajaran Perum Bulog.

Saya hari ini memahami akan kebatinan yang bergejolak di internal Perum Bulog ini ya. Dan tentunya kondisi yang penuh berkecamuk dari tingkat kebatinan dimana penugasannya sebetulnya tinggi sekali, baik dari sisi penugasan berdasarkan Undang-Undang maupun Perpres yang seharusnya ini menguatkan dari sisi kewenangan kelembagaan Perum Bulog itu dari sisi stabilitas pangan baik distribusi maupun konsumsi di tingkat masyarakat. Nah, saya apresiasi sekali kepada Perum Bulog di tengah kondisi seperti ini tapi mampu untuk bisa membantu Pemerintah dalam rangka menyalurkan beras kepada masyarakat. Saya berharap Bapak Buwas dan jajarannya bersabar, kuat, serta tawakal mudah-mudahan kedepan apa yang diharapkan Perum Bulog, dorongan dari Komisi IV DPR RI serta yang lainnya ini akan semakin menguatkan daripada eksistensi Perum Bulog kedepannya.

Dalam kaitan rencana maupun evaluasi yang tadi disampaikan saya ingin lebih mendalami kaitan dengan kita tahu bahwa biaya bunga serta administrasi bank yang mencapai Rp800 miliar yang hingga November 2019 ini tercatat Bulog memiliki hutang Rp28 triliun kurang lebih dengan bunga komersil di atas 8% per tahun. Tentu ini juga kan menjadi persoalan dari tahun-tahun yang lalu. Dan tentu harus bisa keluar terhadap persoalan yang ada. Nah, itu seperti apa nanti skema-skema yang akan dilakukan ke depan.

Dan pada pengadaan tahun 2021 pun saya melihat bahwa skemanya masih sama. Terlebih dengan ditolaknya pengajuan dana talangan Perum Bulog oleh Kementerian Keuangan. Inikan sangat miris, di saat Perum Bulog membutuhkan dukungan, dorongan upaya dari Kementerian Keuangan akan tetapi terjadi penolakan. Saya melihat bahwa setelah dicoretnya Perum Bulog dari daftar prioritas program pemulihan ekonomi negara dalam hal ini. Nah, ini apa sih upaya Perum Bulog mungkin kan dari psikologis ini cukup tertekan untuk Perum Bulog sendiri. Jadi tidak sesuai antara penugasan dengan pressure-presure yang dilakukan baik dari Kementerian Keuangan serta Kementerian yang lainnya sehingga menurunkan daya semangat dari Perum Bulog untuk bisa membantu Pemerintah. Saya juga ingin menyinggung bahwa kita tahu margin 50 per kilo gram yang dilakukan oleh Bulog inikan cukup kecil bila dibandingkan bunga komersial di atas 8%. Ini juga saya kira kasihan, tertatih-tatih banget untuk bisa mengangkat kearah sana.

Dan menyinggung kaitan *rice mild* inikan merupakan alat penggilingan gabah menjadi beras. Bulog tidak memiliki peranan khusus di sector penggilingan, betul tidak Pak. Ini nanti dijelaskan ya karena seperti di Kota Serang Dapil saya juga ini kelihatan bahwa penggilingannya sudah mati bertahun-tahun. Mungkin imbas peranan Bulog untuk tidak melakukan penggilingan beras di lokasi tersebut ini juga pengaruh. Untuk 2021 Bulog siap gelontorkan beras program Bansos 450 ribu ton dalam 3 bulan mendatang. Untuk 10 juta KPM dan 450 ribu ton dalam 3 bulan berikutnya. Ini mohon penjelasan, ini seperti skema yang akan dilakukan.

Ada isu Bapak Buwas kaitan dengan pemecatan 100 pegawai Perum Bulog yang disinyalir mempermainkan stok pangan. Ini mohon penjelasan seperti apa kondisi dilapangan kok bisa disaat Perum Bulog secara kewenangan saja tidak diberikan ada 100 orang yang melakukan hal yang kurang etis. Pemerintah membayar hutang kepada Bulog Rp56 miliar ini hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut BUMN, tercatat 20 Juni 2020. Jadi mohon penjelasannya seperti apa Bulog sendiri untuk bisa disampaikan kepada Komisi IV DPR RI.

KETUA RAPAT:

Cukup Ibu Nur'aeni?

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Satu lagi Bapak Ketua.

Februari 2020 BAPPENAS melalui keputusan Menteri PPN membentuk tim kordinasi penyusunan rencana jangka menengah system pangan nasional. Salah satunya Bulog masuk dalam tim pelaksana, yaitu Direktur Pengadaan dan Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog. Ini juga seperti apa teknisnya.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi Bu Nur'aeni kalau saya berharap dari Dirut Bulog jangan hanya 100, kalau mereka punya penyimpangan, kesalahan, melanggar hukum 500 orang pun wajin dipecat.

Selanjutnya Bapak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Yang saya hormati Ketua, teman-teman Anggota Dewan yang terhormat,
Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Perum Bulog bersama dengan seluruh jajaran.

Kalau ada institusi yang selalu saya perjuangkan ada Bulog Pak, karena saya tahu peranannya Bulog ini hajat hidup orang banyak. Dan saya terus terang sedih ya karena memang persoalan Bulog apa yang Bapak sampaikan ini fakta ada 3 kendala utama. Di Banggar juga saya banyak bicara tentang Bulog kenapa dibuat seperti ini Bulog, tidak mampu mengambil peran utamanya pada saat panen kekurangan uang untuk membeli hasil panen petani.

Kemudian banyak hal-hal yang bisa dilakukan Bulog tapi tidak diberikan kewenangan kepada Bulog. Katakanlah seperti kemarin gula masa 3 bulan diurus impornya baru turun dari sedangkan ini Pemerintah, tapi swasta cepat sekali. Jadi ini ada apa dengan Bulog.

Kemudian dalam pemulihan kebijakan, pemulihan ekonomi nasional ada kebijakan Kementerian Keuangan untuk memberikan PMN kepada BUMN kurang lebih Rp87 triliun. Saya melihat daftarnya itu PLN, Garuda, Bulog tidak masuk. Sedangkan PMN itu diberikan kepada perusahaan BUMN yang hajat hidup orang banyak, tapi kenapa Bulog tidak masuk. Nah, ini persoalan kita. Jadi menurut saya ingin saya tanyakan kepada Bapak dari kendala yang Bapak ajukan 3 persoalan ini kira-kira apa langkah Bapak untuk mengatasi kendala ini.

Apa yang dibutuhkan dari Komisi IV DPR RI, apa yang dibutuhkan dari Komisi VI DPR RI. Kemarin Pak, saya pada saat bulan puasa saya minta beras di Mamuju 32 ton, Bulog hanya mampu mengirimkan 25 ton. Saya beli dengan harga Rp12.500 sesuai dengan HET. Sedangkan kebutuhan saya untuk saya bagi kepada masyarakat itu sekitar 32 ton. Saya beli diluar selebihnya. Itu menandakan bahwa memang lemah dalam kondisi saat ini Bulog.

Oleh karena itu Pak, barangkali tentu teman-teman disini Komisi IV DPR RI sangat ingin mendukung Bapak. Tinggal bagaimana kira-kira dimana peranan Komisi IV DPR RI supaya bisa kita support kepada Bapak karena Bulog ini tidak hanya berada di Komisi IV DPR RI tetapi juga ada di Komisi VI DPR RI. Saya meyakini bahwa dukungan Komisi IV DPR RI lebih besar dibandingkan dengan Komisi VI DPR RI walaupun layanannya beda, barangkali.

Saya kira demikian Bapak Ketua.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak Suhardi Duka, kalau beliau ini sebagai Dirut selalu jalan biasa. Kalau pengusaha importir gula jalan tol, jadi beda.
Selanjutnya Kanjeng Dirjen.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Kabulog Bapak Buwas dan semuanya yang hadir.

Apa yang tadi disampaikan juga ini perlu Bapak Ketua, permasalahan yang di Bulog yang klasik ini perlu kita dukungan yang pertama itu mengenai

kewajiban penyediaan pangan itu berapa sebenarnya. Karena dengan adanya perubahan dari Bansos setelah menjadi bantuan pangan non tunai ini seolah-olah dipermainkan Bulog oleh Kementerian lain. Contohnya, tadi dilaporkan bahwa 2018 itu 2,2 juta ton tapi 2019 hanya 300, nah stoknya itu untuk apa. Bahkan kejadian yang harusnya 1 hari 15 ton kurang lebih 7 ton yang tersalur. Nah, ini mestinya kita rekomendasikan Pemerintah itu tegas jangan seolah-olah Bulog itu diatur oleh Kementerian lain. Beras ini ada batas waktunya Pak, ini kalau kayak gini repot kita.

Terus yang kedua, bunga komersil tapi Pemerintah pinjam sama Bulog tidak bayar, Bulog bayar bunga terus. Nah, mungkin kita dorong kepada Perbankan jangan bunga komersil, kenapa yang lain bisa. Ini mungkin ada rekomendasi kepada Pemerintah, Pemerintah memerintahkan kepada bank-bank yang terkait menjadi beban ini.

Terus yang kedua, tadi sudah disinggung oleh teman-teman soal Lembaga. Pangan ini yang atur itu ada 10 lembaga Pak, dari mulai nanam sampai panen itu ada 10 lembaga. Tapi tidak jelas semuanya ngatur yang positif, artinya yang menguntungkan. Contohnya saja, kalau penyaluran gula itu Bulog itu sampai ke ujung pelosok tanah air yang lainnya tidak mau itu, tapi seolah-olah kalau gula naik kesalahan Bulog. Ini perlu diatur ya karena kalau ini terus seperti ini ya sudah diatur Undang-Undang Pangan itu tidak akan jalan. Dan saya tanyakan juga kepada Bapak Buwas saya baca di internet, ini Menteri BUMN akan melakukan penggabungan PTP 1 sampai 14 dengan Bulog. Tolong dipertimbangkan PTP1 sampai 14 itu hutangnya Rp45 triliun Pak. Jangan Bapak nanti jadi beban lagi, Rp45 triliun itu bukan sedikit Pak. Kata Bapak Ketua waktu rapat disini PTP 1 sampai 14 rugi semuanya Pak, yang untung Dirutnya. Saya pernah di Pemerintahan jadi tahu ya Pak. Nah, ini tolong dipertimbangkan jangan sampai beban yang lain *holding* Bapak tanggungjawab pusing lagi nanti. Ini mohon tanggapannya nanti.

Terus yang terakhir, juga mengenai tadi tindakan kepegawaian diulang lagi Pak, 4 tahun yang lalu. Ini Bapak Ketua, disini waktu itu saya dapat laporan dari Dapil saya Kebumen masyarakat berasnya tidak beres, tapi kalau sekarang mutunya sudah lebih baik. Waktu itu Pak, saya uji coba tumpukan karung itu kami ambil 10 karung, saya timbang isinya tidak 15 kg tapi 12 kg Pak. Kenapa tidak ketahuan? Karena baginya pakai rantang, satu karung bagi tiga. Laporan ke Dirut terbalik Pak, nuduh saya seolah-olah mengada-ngada. Ini saya mantan pernah jadi penyidik 30 tahun kan Kormasnya Bapak dulu, tahu saya kan. Ini nampaknya mencoba-coba Pak, saya kira Bapak ditaruh disitu punya kelebihan soal nyidik menyidik saya kira apa kata Bapak Ketua itu bisa segera dibersihkan karena tugas Bulog itu berat.

Saya kira demikian Bapak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Bapak Sulaeman.

F-NasDem (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Bapak Buwas dengan seluruh jajarannya yang saya hormati.

Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Kabulog yang dalam situasi pandemi kemarin kami juga mendapat bagian dari Bulog untuk membantu masyarakat di wilayah kami di Papua Pak. Sangat membantu sebetulnya karena memang dalam Suasana yang begitu memprihatinkan masyarakat masih ada uluran tangan dari Bulog untuk membantu kami.

Satu hal yang mungkin menjadi keprihatinan kami sebagaimana tadi disampaikan Bapak Darori mengenai kewajiban yang sangat besar, membayar bunga yang tinggi untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Sekali pun begitu saya juga masih juga mengharapkan dari stok gudang kami yang di Merauke ini sekarang memang dibutuhkan segera kalau bisa digeser dari tempatnya, karena yang antri dari petani itu lumayan besar. Ada kurang lebih 15 ribu ton yang memang harus bisa diserap kesana. Pasar memang sulit Pak, hanya harapan satu-satunya di Bulog sehingga kalau bisa ini secepatnya bisa dimasukkan kesana.

Yang berikut tentang realisasi Bansos ini memang saya maklumi karena di daerah saya sebagaimana disebutkan disini di daerah Puncak dan Pegunungan Bintang memang angkutan sangat sulit tapi begitulah keadaan Papua yang memang sulit sejak dulu dan sampai sekarang belum terjawab. Tapi mudah-mudahan dengan upaya yang keras dari Bulog bisa membantu untuk selanjutnya barangkali tidak seluruhnya tetapi sedikit demi sedikit bisa penuhi untuk kepentingan masyarakat.

Ini saja Pak Ketua, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Sulaeman.

Selanjutnya Bapak Dr. Hermanto. Saya suruh Bapak duluan kalau tidak saya tidak kasih nanya nanti, dikasih duluan tidak mau dia.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Baik, Bapak Ketua.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Bapak Ketua, Pimpinan, Anggota Komisi IV DPR RI, dan Dirut Perum Bulog Bersama jajaran.

Pertama, saya menyampaikan “*minal aidzin wal'faidzin, taqobbalalloohu minna wa minkum*” atas kehadiran kita disini. Selanjutnya saya ingin sederhana saja menyampaikan bahwa Sistem Operasi Bulog ini saya menilainya tidak ekuilibrium, tidak seimbang. Saya ingin bertanya kepada Bapak Buwas, apa sih persepsi Menteri-menteri yang ada misalnya Bapak Buwas rapat hadir itu terhadap Bulog ini apa, sehingga Bulog itu di dalam operasinya jadi jomplang, tidak seimbang antara ditugaskan membeli terus tapi tidak ditugaskan untuk menyalurkan. Ini sesuai dengan Bapak Bulog sebutkan di dalam halaman 14 ini. Ini problem utamanya disana.

Saya memandang kalau persoalan kebijakan dasar ini tidak diselesaikan saya menduga itu kedepan Bulog itu akan punya terus seperti ini. Mau diapakan juga Bulog ini ya akan begini terus, dia tidak optimal melayani kebutuhan konsumsi dasar bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu saya minta di forum Komisi IV DPR RI kita harus memberikan dorongan yang kuat kepada Bulog ini supaya Pemerintah itu memberikan kekuasaan atau kewenangan yang seimbang kepada Bulog ini, sehingga antara membeli dengan menyalurkan itu seimbang, sehingga tidak muncul apa yang kita sebutkan dengan stok yang menganggur.

Nah, inikan kalau terjadi idol stok itu yang rugi itu bukan hanya Bulog, karena itu uang negara, uang rakyat tentu yang dirugikan itu adalah negara dan rakyat, bangsa secara keseluruhan. Nah, saya pikir apa yang dilaporkan oleh Bapak Buwas ini sudah cukup bagus, cuman kalau substansinya tidak kita selesaikan saya khawatir kita hanya bolak-balik membahas ini saja ya tidak substansial lagi apa yang mau kita bahas karena Bapak Buwas pun juga sudah menyerah. Saya pikir Bapak Buwas jangan menyerah ini ketika Rapat Terbatas atau segala macamnya itu. Bahwa Komisi IV DPR RI ini memberikan dukungan full kepada Bulog untuk supaya ada kekuasaan yang seimbang atau kewenangan yang seimbang di dalam manajerialnya, terutama dalam operasi-operasinya.

Nah, tentu ini menjadi persoalan dasar bagi kita. Saya hanya focus kepada itu saja Bapak Ketua, kalau kita tidak mendorong ada kewenangan yang seimbang di Bulog ini saya pikir kita ya tidak bisa melakukan atau memaksakan Bulog ini mau berhasil seperti apa sesuai dengan target, karena memang kewenangannya hanya begitu-begitu saja.

Demikian Bapak Ketua.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Memang kalau Doktor yang ngomong beda bobotnya. Jadi intinya Bapak Dirut kewajiban Bulog apa, haknya apa, kan gitu simplenya. Kewajiban Bulog ini dan ini, tapi haknya Bulog belum dipenuhi oleh Pemerintah.

Selanjutnya yang terhormat Bapak Slamet Ariyadi, jangan main handphone terus kalau lagi rapat.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Bapak Direktur Bulog dan jajarannya yang kami hormati pula.

Yang pertama, sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2019 mengingat kebutuhan beras nasional 29,6 juta ton sedangkan produksi beras nasional tahun 2018 adalah 33,9 juta ton. Namun, pada tahun 2019 mengalami defisit yaitu 31,31 juta ton. Dan saya kira ini menjadi problem yang sangat serius bagi Bulog tentunya ini menjadi PR bagi Komisi IV DPR RI dan juga menjadi PR bagi Bulog bagaimana ini ada langkah strategis, ada solusi konkrit yang diberikan kepada Bulog.

Yang kedua, mengingat dengan adanya RKP ataupun RKA pada tahun 2021 perencanaan cadangan beras Pemerintah perlu ditinjau ulang Bapak Direktur. Perlu ditinjau ulang terkait dengan penugasan yang diberikan kepada Bulog terkoreksi dengan mekanisme Bansos Pemerintah yang menjadi BPNT ataupun tidak lagi menjadi Rastra. Sehingga serapan CBP menjadi terkendala dan sangat mungkin terjadi disposal dalam jumlah sangat besar. Yang kedua, dalam penugasan Bulog ada pengembangan industri berbasis pangan pada rencana Bulog 2021, Kami belum melihat secara detail dan secara rinci seperti apa mekanisme ataupun regulasinya.

Yang ketiga, saya mengusulkan pembangunan industri Mukaf yang berbahan baku utama singkong untuk memenuhi kebutuhan tepung sejenis terigu yang jumlah kebutuhannya sangat besar, sehingga negara kita menjadi salah satu negara pengimpor terigu ataupun gandum terbesar di dunia. Selain untuk diversifikasi pangan industri Mukaf juga diharapkan mampu mendorong untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Yang terakhir terkait dengan masalah isu-isu aktual. Penyerapan komoditas pertanian selain beras untuk mengisi gudang Bulog yang masih kosong dengan bahan pangan pokok lainnya seperti jagung, gula dan sebagainya sehingga Bulog juga dapat berfungsi sebagai penyeimbang harga yang tidak hanya ketika harga tinggi. Tetapi kita inginkan bagaimana ketika harga rendah dipasaran rakyat juga tidak merugi.

Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.

*Wallahu Muwafiq Illa Aqwamithariq,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. SUHARDI DUKA, M.M.):

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Bapak Budhy Setiawan.

F-PG (BUDHY SETIAWAN):

Terima kasih.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi IV DPR RI beserta senior Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang saya hormati Bapak Buwas beserta jajarannya.

Langsung saja *to the point*, ada dua hal terkait manajemen stok dan yang kedua terkait dengan sirkulasi stok. Persoalannya sederhana saja, pada saat saya mendatangi Gudang Bulog di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor kebetulan itu Dapil saya. Saya melihat bahwa yang terkait dengan manajemen stok di Kabupaten Cianjur Gudang Bulognya terus terang saja sangat tidak layak untuk Gudang penyimpanan Pak. Ada dua Gudang disana Pak, yang satu baru yang satu mungkin dari jaman kemerdekaan yang satu lagi itu. Saya pertanyakan itu kapan ada usulan dari Bulog Cianjur untuk melakukan perbaikan karena itu sangat-sangat tidak layak. Kondisi beras menumpuk penuh dan juga menumpuk penuh juga kutunya Pak, segudang itu Pak, penuh dengan kutu. Saya pertanyakan ini manajemen stocknya bagaimana. Mungkin apakah kita masih akan dengar kedepan berita-berita tentang busuknya beras, sehingga saya ingin bahwa memang ingin tahu bahwa bagaimana sebenarnya ini perbaikan dari Gudang-gudang ini. Ini terkait dengan manajemen stok Pak, karena kalau misalnya manajemennya kondisi gudangnya seperti itu manajemennya kan kacau balau nanti Pak.

Yang kedua, terkait dengan sirkulasi stok Pak. Jadi dari Gudang Bulog Kota Bogor dan juga Gudang Bulog Kabupaten Cianjur, kondisi saya lihat penuh sekali. Memang saya senang gudangnya penuh dan menghadapi waktu itu pandemi COVID tentunya cadangan beras bisa membantu nanti untuk menjaga pangan di masa pandemi tersebut. Tapi yang menjadi persoalan ternyata dari kepala kantornya itu bahwa Gudang ini menumpuk baik di Cianjur maupun di Kota Bogir karena memang kita sudah tidak menyalurkan lagi Rastra ini. Sementara BPNT-nya itu boleh dibilang dilapangan itu BPNT banyak para kelompok-kelompok ini menginginkan beras lain selain Bulog, karena kualitas, kualitas yang jelek sehingga mereka ingin pengadaan beras BPNT-nya beberapa daerah itu yang diluar Bulog.

Nah, sirkulasi ini tentunya kan akan menjadi permasalahan ketika bulog tidak bisa mengantisipasi penyaluran. Lalu sirkulasinya mandek seperti ini Pak, itu bisa numpuk mungkin 6 bulan sampai tahun depan kali Pak. Nah, persoalan sirkulasi stock saya ingin tahu kira-kira apa langkah dan tindakan Bapak Buwas Bersama jajarannya. Kalau seperti penanya terdahulu saya

Bapak Profesor Hermanto itu kalau memang perlu dukungan Komisi IV DPR RI konkritlah dukungannya apa, tapi jangan main kekuasaan, mentang-mentang Bulog adalah alat Pemerintah semua harus serap beras Bulog, jangan main kekuasaan juga ini bicara sekarang kualitas Pak.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Bapak Salim Fakhry silakan.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Bapak Ketua yang kami hormati,
Teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI,
Bapak Buwas dan jajarannya.

Setelah beberapa teman tadi Bapak Buwas nampaknya Komisi IV DPR RI penuh mendukung Bapak dalam kebijakan walaupun kami memahami penderitaan Bapak yang bisa begitu tegas dan lugas dengan kekuasaan Bapak di Bulog ini sekarang sebenarnya kalau kami ukur dari hati Bapak kurang menerima Pak, diperlakukan seperti ini.

Cuman support kami sebagai mitra ya Bapak Suhardi katakan tadi Komisi IV DPR RI ini sangat mendukung cuman diantara kami ini Bapak Sulaeman yang mungkin salah satu beruntung di Komisi IV DPR RI Pak, karena dalam situasi COVID beliau cuman dapat kemudahan dari dari Bulog bantuan Pak, kalau saya di Aceh Bapak Ketua sampai sekarang mendengar di Komisi VI DPR RI itu mitra Bulog juga ada sebagai mitra, cuman Komisi IV DPR RI saya tidak tahu Bapak Ketua. Mungkin dari 50 sekian saya yang tidak dapat.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak, Aceh dianggap lebih mampu, saya dapatnya cukup banyak.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Kalau Bapak yang dapat, Bapak Ketua wajar saya kira Bapak Buwas, karena beliau Pimpinan. Cuman kalau Bapak Sulaeman ini sama dengan kami yang duduk disini Pak. Tidak apa-apa memang kita Bapak Buwas kita terbuka saja Bapak Ketua, seolah-olah kan Bulog ini hanya bermitra di Komisi VI DPR RI padahal kita ini dukung full. Cuman tidak apa-apa Bapak Buwas, kedepannya karena masih COVID ini menghadapi Idul Adha mana tentu kalau Bulog merasa mungkin ada apa sebagai mitra kami teman-teman siapa

Bapak Buwas memberikan Bansos akan kami katakan ini dari Pak Buwas Bulog cuman kami yang menyalurkan Pak, kami hanya nama saja cuman Pak.

Yang kedua Bapak Ketua, ada saya kira di bilang Bapak Budhy tadi dilapangan Pak, dalam penyaluran bantuan pangan non tunai Pak. Ini perlu dikoordinasi nampaknya Pak. Ada beberapa kabupaten ini sudah ada surat edaran di 2019 yang menyalurkan adalah Bulog, ternyata ada di Kabupaten Kota ada pihak ketiga, ini kasus dan ini masukan kepada Bulog ke pihak ketiga sementara Bulog di Kabupaten Kota yang dikatakan Bapak Ketua tadi semua sudah membeli beras ini Bapak Ketua. Ada Pimpinan Daerah memberikan kepada pihak ketiga, bukan Bulog yang menyalurkan. Jadinya stok barang ini mau kemanakan nanti Bapak Buwas, ini terutama di Kabupaten Aceh Tenggara. Barusan saya telepon kepalanya lagi rapat sama Bapak Sekda sudah ada titik terang. Cuman harapan kami Bapak Buwas masukan kepada Perum Bulog agar dikoordinasikan kemungkinan dengan Kementerian ada surat edaran yang tegas yang ini harus Bulog yang menyalurkan. Kalau pun ini bukan Bulog Bapak Ketua, tutup saja Bulog ini. Di Kabupaten Kota tidak ada lagi, inilah kasus mungkin Bapak Ketua di kesimpulan salah satu nanti dimasukkan.

Sebenarnya sebelum saya akhiri Bapak Darori, beruntunglah Bapak Ketua sama Bapak Sulaeman walaupun cemburu kami ada mewakili teman kami bantuan Bansos dapat dari Bulog. Mudah-mudahan kedepan hati Bapak Buwas dan teman-teman membuka kepada rekan-rekan yang lainnya.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi Bapak Dirut, beliau ini sangat teliti karena dalam Rapat Paripurna pertama itu menjelaskan mitra Komisi IV DPR RI adalah 3 kementerian, 1 Badan Restorasi Gambut dan 1 Perum Bulog. Jadi kalau dengan Komisi VI DPR RI cuman say hello karena BUMN-nya. Saya paham Pak Salim, cuman Anggota biasa saja jadi beda dengan Pimpinan. Dia bukan Ketua, kalau ini Ketua. Bukan itu Pimpinan cuman mendampingi nanti Bapak Suhardi Duka minta juga bagiannya ini.

Selanjutnya Bapak Endro Hermono.

F-GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.):

Terima kasih Ketua.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Ketua Komisi IV DPR RI beserta jajaran yang saya hormati,
Bapak Direktur Bulog Bapak Buwas beserta jajaran yang sangat saya banggakan.

Kami telah menyimak apa yang telah disampaikan oleh Bapak Buwas Direktur Bulog, tentang persoalan-persoalan yang ada di Bulog sampai tadinya kendala pelaksanaan kebijakan pangan seperti yang akhir ini. Dan kalau kita amati memang persoalan-persoalan ini juga sudah disampaikan kepada rapat-rapat yang lalu dan kita menyimak dan memberikan masukan dan sebagainya.

Namun, pada kesempatan ini iijinkan kami juga memberikan masukan dan juga mungkin pemahaman kita bahwa memang Bulog ini, ini memang instansi yang sangat penting dan sangat pokok bahkan menjadi suatu keputusan impor tidaknya suatu barang khususnya beras. Beras itu tidak melihat jumlah panen tetapi stok yang ada di Bulog. Karena pentingnya ini Pak, di sini tidak hanya ilmu yang ada disitu, tidak hanya *skill*, tapi juga ada kemampuan untuk mengurus ini. Kalau hanya ilmu mungkin tidak perlu Bapak Buwas untuk menjadi Direktur ini. Baca *youtube* ini ngritik kemudian ini sudah cukup.

Kemudian kalau *skill* itu juga saya kira bukan Bapak Buwas, karena duit ada, pasar ada, pengadaan ada, harga cocok, tidak perlu Bapak Buwas. Tapi disini harus beli produsen harga ke konsumen juga tidak tentu juga nantinya barang rusak tidak ada yang tanggung, duitnya tidak ada lagi, makanya perlu kemampuan makannya negara dalam hal Pemerintah menunjuk Bapak Buwas sudah cocok sekali. Oleh karena itu, pada waktu kesempatan yang dulu ketika Bapak Buwas ditunjuk disini kita bangga karena mempunyai ilmu juga punya, *skill* juga punya, kemampuan saya kira punya juga ini sehingga dengan adanya ini saya kira. Karena salah satu kemampuannya juga komunikasi Pak, komunikasi dengan Komisi IV DPR RI enak sekali walaupun pada waktu itu mohon maaf saya memikirkan “wah, Pak Buwas dari Bareskrim ini nanti sulit untuk diajak ini”, ternyata ini. Jadi kenapa ini saya kira mampu Pak, nantinya untuk menyelesaikan ini. Walaupun penyalurannya tidak ada, walaupun ini tetapi terobosan-terobosan yang dilakukan memang mempunyai kemampuan yang seperti itu. Kami Komisi IV DPR RI akan mendukung sepenuhnya Pak. Ini yang pertama.

Yang kedua Pak, tentunya kita orang awam apalagi masyarakat awal itu tahunya ada impor-impor. Contohnya adalah kedelai, impor kedelai, tetapi kita juga terjun kepada masyarakat Pak, ada pengrajin tempe dan tahu dan sebagainya setelah kita tanya-tanya itu memang dia itu senengnya kedelai impor bukan kedelai local. Nah, masyarakat awam tidak mengetahui itu tahunya kedelai bisa untuk tempe dan tahu. Oleh karena itu, mohon penjelasan Pak, di dalam hal ini biar nantinya kita juga bisa sosialisasi kepada masyarakat yang awam bahwa untuk kedelai impor gunanya untuk ini dan ini, sehingga masyarakat ini tidak membuat pemikiran yang sendiri-sendiri, ngarang sendiri-sendiri akhirnya menjadi ricuh seperti ini. Ini yang kedua.

Yang ketiga Pak, sering juga disampaikan disini bahwa Bulog ini harus terobosan salah satu kemampuannya Bapak Buwas tadi adalah bunga komersial pinjam bank dan sebagainya. Mohon Pak, menurut pengalaman saya itu tidak menjadi masalah asal bebannya itu ditanggung siapa. Kalau itu nantinya beban bunganya ditanggung masyarakat ini yang memprihatinkan

nantinya akan membebani. Tetapi kalau beban bunga ini bisa ditanggung APBN *why not*. Biar dana yang ada di masyarakat itu bisa digunakan di bidang yang lain, kementerian yang lain lebih berguna karena Bulog bisa untuk pinjam dan bunganya untuk di ini. Ini kemampuan manajerial, makanya seperti tadi kemampuan manajerial. Yang saya ingin tanyakan Pak, bebannya kepada siapa ini, beban bunganya? Kalau masalah pinjam bank dan sebagainya no problem itu dari mana pun. Tetapi yang penting adalah beban biaya bunga ini.

Saya kira tiga itu Pak, yang ingin kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hendro.

Selanjutnya Bapak Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Ketua.

Pimpinan dan Anggota yang terhormat,
Bapak Dirut Bulog Bapak Buwas dan seluruh jajaran yang juga saya hormati.

Ingin kami sampaikan pertama mungkin beberapa catatan dari Bulog itu memaknai bahwa itu permaknaan pertemanan. Pemerintah itu anggap Bulog itu *friendshipness* jadi saat dibutuhkan atau tidak dibutuhkan Bulog tetap ada. Ini ada tulisan disini harga jatuh gue dipanggil, harga tinggi gue dipanggil, gitu kira-kira. Nah, ini saya mengambil posisi Pak Dirut, ini adalah dari sisi politik pangan yang ada di internal Pemerintah kita. Tentu semua paham pada saat bicara tentang pangan seluruh sektor sedang berebut untuk mendapatkan *positioning*-nya. Terserah dia berhadapan dengan kebijakan yang lain, terserah Presiden ke timur dia ke barat, kan kenyataan seperti itu. Mudah-mudahan Bulog bisa mendapatkan *positioning* yang tepat tentu dalam sebuah rangkaian kekuatan politik yang ada di dalam kebijakan Pemerintah kita. Dan kita di Komisi IV DPR RI, *Insha Allah* terus mendukung secara politik karena kita kebijakan politik. Jadi Komisi IV DPR RI harus mendukung kebijakan Bulog agar mendapatkan posisi politik dalam konteks politik pangan dalam kebijakan Pak Jokowi hari ini. Dan disadari betul bahwa banyak pihak dengan *the end justifies the means* menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu hal. Dan Bapak Buwas paham betul, kenapa sekelompok orang begitu memaksakan begini, begini, kalau tanpa keuntungan mustahil. Kan semua juga berhitungnya keuntungan.

Yang kedua Pak Buwas, kami ingin sampaikan dari sisi keterbatasan kita memang kemari nada evaluasi kita ya. Di bulan Ramadhan di saat

memang tinggi-tingginya waktu itu propaganda COVID-19 ini dengan posisi orang tidak boleh pulang. Kata Bapak Presiden boleh pulang kampung tidak boleh mudik, kata orang yang balik mudik, pulang kampung ya itu-itu juga tidak ada bedanya, susah kan maksudnya. Pulang kampung susah, mudik susah. Nah, di kampung itu kondisinya harga beras, harga serap gabah itu sangat murah sekali. Nah, ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan pada saat sudah menghadapi lebaran, menghadapi orang-orang yang dari kota yang juga butuh makan, balik ke kampung itu bukan bawa duit sekarang itu, tetapi butuh makan mereka itu. Nah, ternyata harga begitu murah. Mohon untuk diperhatikan bagaimana penyerapan kita kedepan ini akan menjadi posisi kalau kita penyerapannya baik, kita punya alasan logis baik basis politik maupun bisnis bahwa Bulog butuh diperhatikan oleh Pemerintah.

Kedepan mudah-mudahan Bapak Buwas beserta jajaran lebih mampu mendayung dalam situasi COVID-19 ini yang tentu kita berpikiran tidak akan selesai 2 bulan, tidak akan selesai 3 bulan. Ini dalam fase yang Panjang dengan kondisi bagaimana hari ini *suspect*-nya tinggi kita berpikir ini dengan segala pesimis yang dimiliki ini akan lama, tapi optimisnya cepat selesai. Nah, dalam konteks kita melihat hal ini lebih Panjang persiapan kita untuk penyiapan stok karena krisis pangan akan terjadi.

Bapak Ketua Komisi IV DPR RI bolak-balik 2 bulan lagi kita khawatir ini akan ada kemarau panjang dan resiko kita a, b, c, d dan itu tentu Bulog sudah membuat perspektif, sudah memperkirakan dan sudah memberikan persiapan. Nah, langkah-langkah strategis untuk meyakinkan Bapak Presiden siapa badan yang lebih layak dan pantas untuk menangani ini.

Terima kasih Bapak Buwas. Terima kasih Bapak Ketua.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Haerudin.

Saya tergelitik tadi Bapak Endro bicara masalah kedelai. Kenapa sih impor kedelai tidak ditugaskan kepada Bulog. Dan saya anggap impor kedelai saat ini itu adalah monopoli, satu pengusaha bisa impor mencapai 1 juta lebih. Ini nanti dalam Ratas Bapak Dirut sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi kenapa tidak berbagi porsi, kenapa hanya swasta saja yang bisa mendapatkan fasilitas impor. Sedangkan impor kedelai itu tidak ada regulasinya di Kementerian Pertanian, saya sudah mendorong supaya ada regulasinya di Kementerian Pertanian. Jadi jangan seenak-enaknya saja pengusaha besar ini mendapatkan impor kedelai.

Selanjutnya yang virtual yang pertama yang saya hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI Bapak Daniel Johan.

Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Ketua yang kita cintai beserta seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Buwas dan segenap jajaran.

Selamat siang,
Semoga semuanya sehat.

Ada beberapa hal yang ingin perlu saya sampaikan, yang pertama adalah Bapak Buwas saya tadi pagi banyak dihubungi oleh media katanya Pemerintah akan segera membentuk Badan Cadangan Pangan Strategis. Itu apalagi, Bapak Buwas sudah sempat mendengar apa belum.

KETUA RAPAT:

Belum dapat berita dan belum juga mendengar mungkin itu baru isu Bapak Daniel.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Makanya bagi kami di Komisi IV DPR RI apa yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar bahwa badan pangan nasional harus segera dibentuk saja belum terealisasi sampai saat ini. Lalu kalau tiba-tiba dibentuk lagi Badan baru menjadi Badan Cadangan Pangan Strategis saya rasa itu suatu yang harus kita kritisi dengan baik. Karena kita harus memperkuat Bulog bukan justru malah membuat semakin ruwet. Kita berharap Badan Pangan Nasional segera dibentuk, Bulog ditransformasi dengan Badan Pangan Nasional sehingga menjadi badan yang kuat seperti sebelum reformasi 98.

Yang kedua adalah kita ingin menanyakan bagaimana Bulog mengantisipasi rawan pangan akhir tahun ini termasuk di 2021. Karena rasanya persoalan pandemic COVID itu masih berkepanjangan, anggaran pertanian bahkan berkurang hampir Rp4 triliun tentu akan mengakibatkan produksi akan jauh berkurang. Subsidi pupuk juga berkurang jauh, bahkan hanya beberapa daerah dari 100 LBKK hanya 30% terpenuhi. Nah, saya rasa ini cukup mengkhawatirkan ya. Bagaimana Bulog menyasati hal itu.

Yang terakhir saya sempat Rakor Pangan di Kalimantan Barat termasuk Bapak Ketua Pimpinan Bang Sudin. Disitu Bulog menyampaikan beberapa kesulitan bahwa salah satunya seperti yang sudah kita ketahui di satu pihak Bulog mengalami kesulitan untuk menyerap gabah petani karena memang harga di pasaran lebih tinggi dari harga yang ditetapkan. Tetapi yang sebaliknya yang kedua, apa yang sudah terserap, apa yang ada di gudang Bulog itu mereka khawatir kelebihan. Artinya, saya rasa kita harus memikirkan ini biar Bulog bisa berjalan dengan baik harus ada kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga lain. Mungkin kayak beras-beras PNS atau yang lain dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Lembaga lain itu bisa menyerap apa yang menjadi persediaan komersial dari

Bulog. Saya tidak tahu tapi Ketua saya berharap mungkin itu bisa menjadi salah satu kesimpulan bagaimana kita mendorong RKA-K/L agar bisa memprioritaskan beras Bulog sehingga Bulog bisa berjalan dan semakin bisa menjalankan tugas dengan baik.

Sementara itu saja Bapak Buwas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak Daniel, saya hanya menjelaskan kepada Bapak Daniel yang pimpinan. Kementerian Pertanian dengan anggaran Rp21 triliun di 2019 menghasilkan 52 juta ton gabah kering giling. Kemudian karena ada pemangkasan jadi Rp14 triliun hasil produksinya meningkat menjadi 54 juta ton gabah kering giling. Entah dari mana asalnya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Hebat dong, kita harus belajar itu Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Maka besok kalau Rp12 triliun bisa mencapai 60 juta ton gabah kering giling.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Pemotongannya dikasih Bulog saja Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Bapak Guntur Sasono.

F-PD (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):

Ketua, Pimpinan yang saya hormati,
Para Anggota Komisi IV DPR RI dan Bapak Dirut Perum Bulog beserta jajarannya.

Saya ingin mensikapi terutama dalam halaman terakhir Bapak Bulog, kendala pelaksanaan kebijakan pangan. Tiga-tiganya ini menurut saya bukan kendala Bapak Bulog, tapi justru ini tugas pokok merupakan senjata Bapak untuk menyelesaikan. Kalau ini semuanya seperti ini bagaimana Bulog mau eksis. Contoh yang pertama, penugasan Bulog bersifat Ad hoc, kalau Ad hoc itu ya kalau perlu dipakai, kalau tidak perlu ya sudah. Itukan pengertian adhoc kalau dibutuhkan suruh ngutang lagi, ngutang bayarnya telat, bagaimana ini peranan Bulog kalau berlanjut seperti ini.

Yang kedua, penugasan belum terintegrasi antara Kementerian dan Lembaga. Ini juga banyak terjadi di lapangan, banyak kementerian intervensi tentang tugas pokok Bulog. Kemensos misalnya kemarin terakhir berebutan untuk pengadaan beras dan lain sebagainya.

Yang ketiga, belum lengkapnya kebijakan turunan Perpres. Kita masih melihat belum siapa penentu kebijakan impor ini. Menteri teknis kadang-kadang tidak dianggap, lari kemana-lari kemana. Ini menurut saya sangat berperan di dalam suksesnya tugas pokok Bulog. Jadi Bulog selama ini kalau saya lihat sebagai untuk tambal sulam saja. Rasanya kalau ini berlanjut kehadiran Bulog belum dirasakan secara nyata oleh petani karena memang lapangan banyak yang dipermainkan harganya oleh para tengkulak. Demikian yang pertama tentang kendala dari Bulog.

Kemudian juga Pemerintah menugaskan Bulog untuk wajib jaga ketahanan pangan dengan pinjaman komersial. Nah, ini pinjaman komersial ini Bulog bayar bunga terus. Sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang juga belum dibayar. Namun, di atas semuanya saya kira tadi semua teman mengapresiasi tugas Bulog berhasil. Kenyataannya kebijakan Bapak Buwas beras tidak impor sampai sekarang bisa bertahan. Terima kasih Bapak, ini adalah kebanggaan kita sebagai bangsa, negara agraris tidak mengimpor beras.

Terima kasih.

Kemudian yang ketiga, saya mohon Bapak Buwas lebu buas lagi karena kenyataan dengan menghentikan impor beras kita menjadi kebanggaan. Syukur kalau bangsanya impor tadi kedelai, impor daging, impor bawang, ini semuanya Bapak Buwas punya terobosan betul-betul itu saya harapkan dari teman-teman Komisi IV DPR RI.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih jenderal atas petuahnya.

Selanjutnya Ibu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Buwas dan teman-teman sejawat yang saya hormati.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Saya sudah mendengar tadi dari beberapa teman. Jadi saya hanya singkat saja Bapak Buwas. Yang pertama kali saya apresiasi terhadap Bapak karena pada waktu saya membeli beras untuk anti COVID ternyata Bapak

begitu tegas memberikan sanksi kepada anak buahnya yang membagikan beras tidak baik.

Kemudian yang kedua Bapak Buwas, saya hanya ingin memberikan peluang kepada Bulog supaya bisa juga nantinya kalau sudah dapat berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang lain tentunya jadi tidak hanya sebagai mendistribusikan beras atau menyimpan beras saja tetapi komoditas yang lain. Karena kita ketahui Bersama bahwa kita ini sebetulnya Gudang pangan diluar beras, jadi misalnya sagu kemudian jagung dan lain sebagainya. Tadi Bapak Ketua, sudah menjelaskan bahwa memang ada mafia-mafia impor, itu bagaimana Bapak Buwas punya strategi untuk mengurangi minimal para mafia-mafia tersebut karena UKM-UKM kita juga banyak mengeluh. Tadi yang dijelaskan Bapak Endro tentang pengusaha tahu, tempe, itu sangat dirugikan dengan adanya mafia-mafia yang tidak bertanggungjawab terhadap kesejahteraan petani-petani kita.

Nah, untuk itu Bapak Buwas melalui Bapak Ketua tentunya Komisi IV DPR RI ingin mendorong supaya peran Bulog ini lebih kuat lagi. Dan juga tadi bisa mengakomodir kemasan-kemasan yang diluar terigu, karena kita ketahui Bersama bahwa sekali UKM-UKM kita juga yang sudah mengemas bahan-bahan pangan diluar terigu.

Terima kasih.

Selamat Bapak Buwas.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Bapak Sutrisno, ada tidak?

Bapak Johan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Bapak Ketua yang saya hormati dan teman-teman semuanya,
Bapak Buwas Kepala Bulog yang saya hormati.

Saya mungkin melanjutkan teman-teman tapi saya coba sampaikan kinerja dari Bulog. Pertama, soal capaian realisasi pengadaan gabah pada tahun 2019 hanya mencapai 1,201 juta ton dari target RKP 2019 sebanyak 1,8 juta ton. Sedangkan per 8 April 2020 baru terealisasi 103.714 ton atau masih jauh berada di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2020. Jadi itu yang pertama.

Yang kedua, realisasi penyaluran beras PSO Perum Bulog pada tahun 2019 terus mengalami penurunan drastis sampai sekarang, sedangkan penjualan beras komersial ... (Sinyal Kurang Baik) ...

KETUA RAPAT:

Bapak Johan sinyalnya kurang bagus, maka Bapak kalau beli laptop, beli handphone sekalian beli sinyalnya. Kembali kepada Bapak Sutrisno dulu, stop dulu kembali kepada Bapak Sutrisno. Nanti Bapak Johan kembali lagi.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Ketua, Bapak Dirut Perum Bulog.

Saya mungkin agak berbeda dengan pandangan teman-teman yang lainnya. Dua kali kita bertemu membahas masalah ini, masalah kemarin pun sekarang muncul kembali. Saya meyakini Bapak hadir di Perum Bulog ada tugas khusus, yang menurut keyakinan saya bagaimana memperbaiki manajemen pengelolaan pengadaan pangan di negeri kita ini. Berarti perundang-undangan sesungguhnya sudah memenuhi apa yang diatur pada PP Nomor 13 Tahun 2016 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 semuanya sudah tercakupkan bukan hanya menyediakan beras akan tetapi juga pangan-pangan yang lainnya, sebagaimana diatur pada Perpres Nomor 48 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (2) e bahwa Bulog ditugaskan pula untuk mengembangkan industri berbasis beras termasuk produksi padi, gabah, dan pengolahan gabah dan beras.

Yang terjadi saat ini adalah lebih kepada bagaimana Bulog sebagai pedagang tidak mengolah sendiri. Hingga harga yang masuk ke Perum Bulog tidak bisa bersaing dengan harga dari produsen. Mohon maaf Bapak Dirut, ini fakta dilapangan saya siap mempertanggungjawabkan harga stok beras di Bulog itu berbeda dengan harga produsen. Harga produsen berbeda dengan harga yang sudah masuk pada Gudang Bulog. Ini yang tentunya perlu diperbaiki.

Oleh karena itu, persoalan yang tadi disampaikan adalah kalau seandainya Perum Bulog menunggu terus perintah-perintah saya menghitung kebutuhan anggaran yang untuk Bapak sekitar Rp125 triliun karena kalau penugasan dilakukan tentunya dengan anggarannya. Oleh karena itu, solusi yang memang harus dilakukan Bapak Ketua kalau seandainya usulan anggaran Cadangan Beras Pemerintah termasuk juga subsidi sebesar Rp19 koma sekian triliun itu disepakati tentunya sudah clear, karena ruang lingkup yang memang dijalankan oleh Perum Bulog adalah bagaimana cadangan Pemerintah disiapkan dengan subsidiya.

Pertanyaan saya sebelum kita merekomendasikan harga atau usulan kepada Perum Bulog apa dasarnya Perum Bulog mengusulkan harga patokan beras 2021 10.801 harga saat ini dipasaran diproduksi itu masih Rp9.000. mestinya patokan harga itulah yang menjadi dasar untuk penentuan subsidi manakala Perum Bulog melakukan tindakan untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga.

Kemudian cadangan beras Pemerintah untuk subsidi itu hanya 8.100. Saya kira ini yang perlu dibedah, saya tetap mengusulkan Bapak Ketua sebagaimana pada rapat yang lalu Perum Bulog akan bisa disesuaikan manakala kita selesaikan bagaimana manajemen pengelolaan untuk itu usulan Panja dan Pansus itu saya tetap ingin mengusulkan.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Kalau Panja, Pansus tidak ada jalan keluarnya ya percuma Bapak Sutrisno. Bapak Johan bisa lagi tidak?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

KETUA RAPAT:

Ya, *Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*
Sudah beli tadi signalnya?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Oke, sudah.

Jadikan yang perlu kita pertanyakan itukan tadi sudah ada yang sampaikan. Bulog itu tidak termasuk BUMN yang mendapatkan dana dari Pemerintah dalam COVID itu. Dicoret dia dari daftar penerima bantuan dana talangan modal kerja pada pemulihan ekonomi nasional. Nah, percuma saja misalnya kalau Komisi IV DPR RI mendukung Bulog, Presiden sendiri atau Pemerintah atau Kabinet sendiri tidak memberikan perhatian khusus kepada Bulog ini, karena itu menimbulkan pertanyaan kita Bapak Ketua.

Mungkin bisa kita lihat dari kinerja Bulog, pertama dari capaian realisasi pengadaan beras nasional 2019 hanya mencapai 1,2 juta ton dari target 1,8. Nah, per 8 April 2020 baru terealisasi 103.742 ton jauh di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2020 ini. Yang kedua, kinerja yang saya soroti adalah realisasi penyaluran beras PSO Perum Bulog pada tahun 2019 terus mengalami penurunan drastis, hanya 10,66% dari target 2019. Karenanya mungkin kita minta penjelasan dari Bapak Dirut Perum Bulog Bapak Buwas bagaimana sih idealnya Bulog menurut Bapak Buwas ini dengan karena kalau misalnya diajukan anggaran seperti tapi kalau misalnya perhatian Pemerintah atau cabinet sendiri terhadap Bulog tidak diberikan full percuma kita dukung. Itu Bapak Ketua yang pertama.

Yang kedua, mungkin karena saya di Pulau Sumbawa ini sentral jagung Bapak Ketua, Bulog ini masih bermain di beras saja. Sementara komoditas-komoditas lain belum ada, sementara masyarakat itu sangat membutuhkan kehadiran Bulog ini. Apa ada kemungkinan Bapak Dirut untuk

bermain di jagung misalnya seperti ini sehingga petani jagung kita itu tidak dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak.

Mungkin itu Bapak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak Johan ada Peraturan Presiden Nomor 48 menugaskan Bulog untuk padi, jagung, kedelai, tetapi itu baru Perpresnya belum ada regulasi di selanjutnya.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ya itu saya bilang Bapak Ketua, Presiden sendiri belum memberikan perhatian kepada Bulog ini bagaimana kita mau tambah anggarannya kalau begini.

KETUA RAPAT:

Ya, selanjutnya Bapak Slame Fraksi PKS.

Selanjutnya Bapak Slemat nanti, Pimpinan yang mulia Bapak Hasan Aminuddin.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Siap, semoga signal saya bagus.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Ketua yang saya hormati dan segenap Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Direktur Utama Perum Bulog, Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama, langsung saya lebih tertarik menyikapi kendalanya Bapak Buwas ini, Bapak Budi Waseso ada satu curhat yang tertuliskan penugasan penyediaan stok tidak dibarengi dengan kebijakan penyaluran sehingga stok berlebih. Satu pertanyaan Pak, apakah stok Bulog sampai dengan akhir 2020 ini aman untuk kebutuhan rakyat seluruh Republik Indonesia. Itu yang pertama yang penting sehingga kepercayaan saya selaku wakil rakyat dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI ini terhadap hasil kajian BPS kepada Kementan bahwa stok pangan di seluruh Indonesia aman. Itu yang pertama.

Yang kedua, inikan Bahasa berlebih, Bahasa berlebih ini saya ingin memberikan solusi. Saya tidak tertarik Bapak Buwas ini marah-marah sebagaimana saran tadi Ibu Endang, Buwas agar lebih buas coba dirubah karena Perum Bulog ini beda dengan habitat Buwas sebelumnya sebagai

Kabareskrim. Bagaimana *enterprenuer* Bapak Buwas ini diciptakan secara lahir dan batin sehingga senyumnya orang tertarik sebagai *enterprenuer*.

Yang kedua, lakukan pendekatan informal dengan siapa pun, baik informal maupun formal. Saya berikan solusi ini dengan stok banyak ini bagaimana mendistribusikan karena Perum Bulog ini sudah tidak usah diajarin karena institusinya yang sudah lahir semenjak republik merdeka, apalagi jaya-jayanya saat Soeharto almarhum sudah, yang baik kan kita angkat. Nah, bagaimana melakukan MoU dengan Mendagri, inikan teman sejawat mudah kan. Sampai dengan dicontohkan di Lampung dengan pendekatan yang dibantu oleh Bapak Sudin, Bupati yang anak buahnya langsung diperintah. Ini contoh yang baik, coba Bapak Buwas satu pintu saja dengan Kemendagri dulu. Bagaimana bupati dan walikota seluruh Republik Indonesia pasarnya cukupkan dengan PNS, *Insha Allah* stok Bapak Buwas ini akan seimbang antara panen raya dengan pendistribusiannya. Saya bukan hanya beretorika ini Bapak Budi Waseso selaku Direktur Utama. Saya tidak pernah beretorika, saya mengamalkan salah satu bupati di Dapil saya melakukan MoU dengan Bulog melalui anak buahnya Bapak Budi Waseso ini.

KETUA RAPAT:

Bupatinya siapa itu?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Bupati Kabupaten Probolinggo.

Bapak Tri datang ke kampung saya, saya hadirkan semua pejabat dilingkungan Pemerintahan Daerah, karena bisa mempengaruhi otak bupati. Akhirnya sampai detik ini sudah berapa bulan ini Bapak Buwas seluruh PNS di Kabupaten Probolinggo menerima di tempat beras Bulog yang *image*-nya sebelumnya itu beras Bulog identic dengan nasi kucing, *Alhamdulillah* para pejabat ternyata premium itu tidak sebagaimana yang saya terima sebelumnya. Inilah Bapak Buwas solusi terhadap curhat Bapak Buwas, saya berharap Bapak Buwas ini tidak buas sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Endang, karena Perum Bulog ini bagaimana *enterprenuer*-nya jalan.

Barangkali sekian, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Hasan.

Sampaikan salam saya untuk Ibu Bupatinya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Tapi belum terima berasnya dari Bapak Sudin ini.

KETUA RAPAT:

Jadi Bapak Dirut tadi apa yang dikatakan oleh Daniel Johan. Badan Cadangan Pangan Strategis itu baru wacana dari Bappenas, sedangkan Undang-Undang yang sudah dibuat belum dijalankan.

Selanjutnya senior dari Bali Bapak Made Urip, Bapak Charles Meikyansah ada tidak? Kalau Bapak Charles tidak ada, Ibu Riezky Aprilia.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Mohon maaf saya tidak bisa ada di tempat Pimpinan. Yang pasti saya bangga hari ini berarti rekan-rekan di Komisi IV DPR RI ternyata bisa begitu sayangnya dengan Perum Bulog, walaupun sering agak dicuekin sama Perum Bulognya sendiri.

Yang pasti begini Bapak Buwas, saya pada dasarnya cuman satu hal yang saya ingin pertanyakan karena saya ini anak baru di komplek KK. IV itu. Ini Bapak Buwas kan sering rapat ya, coba ditanya kalau di Ratas-Ratas itu terminology kita ini yang saya sering baca itu sebenarnya kita ini bicara ketahanan pangan atau kedaulatan pangan Pak, kan begitu dulu supaya relevansinya agar Bapak bisa bersinergi dengan kementerian-kementerian terkait terutama Kementerian Pertanian Pak. Mohon maaf Pak, saya orang awam. Selama ego sektoral ini tidak terkoneksi dengan baik saya kok rasanya agak pesimis bahwa Bulog ini kedepannya bisa didorong sebagai satu perusahaan umum milik negara yang memang bisa membantu masyarakat Indonesia.

Nah, jadi saya sebagai Anggota Komisi IV DPR RI yang *Insha Allah* terus di Komisi IV DPR RI kalau bisa ya semoga kedepannya Bapak juga menunjukkan gitu loh Pak, bahwa Bulog ini eksis. Saya ini termasuk *customer*-nya Bulog tetap Pak, setiap reses sama Bulog walaupun tidak dibantu, bantu doa tapi tidak apa-apa, kan begitu. Jadi penting Pak, tadi saya sampaikan kembali lagi penting bahwa Bapak memang mengedepankan dulu mitra-mitra Bapak juga yang memang terkait dengan ketahanan pangan atau kedaulatan pangan tadi Pak. Karena ini dua *terminology* yang berbeda Pak, kalau ketahanan pangan kita cuman bertahan saja berapa saja kita siap. Tapi kalau kedaulatan mau tidak mau kita harus bekerja sama dalam segala bentuk. Jadi Pak, saya mohon kedepannya Bulog juga serius karena saya lihat teman-teman di Komisi IV DPR RI serius itu Pak, membantu Perum Bulog ini.

Sekian dari saya Pimpinan, semoga sehat selalu semua.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih Ibu Kiki.

Selanjutnya Bapak Rudi yang dari NTB.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Bapak Ketua, saya tidak lama-lama takut signalnya tidak bagus.

Bapak Budi Waseso dan jajarannya yang saya hormati.

Jadi saya tadi mendengarkan bahwa teman-teman sudah memberikan semangat buat Bapak Budi Waseso. Bapak Budi Waseso ini kita yakin luar biasa, tapi memang perlahan-lahan ya. Saya tahu dan saya dengar bahwa tagihan Bulog ini pada Pemerintah hampir Rp2 triliun kalau tidak salah, jadi kasihan juga. Kemudian barang-barang tetap harus disimpan tetapi meminjam uang dari bank juga berjalan bunganya. Saya mengharapkan agar Perum Bulog dalam hal ini Bapak Budi Waseso dan jajarannya melakukan penegasan kepada Pemerintah. Mudah-mudahan kedepan lebih enak sekali lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Saya kira itu saja Bapak Ketua Sudin yang saya hormati, Bapak Budi Wseso dan jajaran. Salam hormat dari kampung halaman.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Selanjutnya Bapak Made Urip dari Bali, tidak bisa ya?

Oke, demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI. Selanjutnya kami persilakan kepada Dirut Perum Bulog untuk menyampaikan jawabannya, tapi kalau bisa jawabannya kan pertanyaannya hampir sama, tanggapannya hampir sama dijadikan satu saja.

Silakan.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI.

Yang pertama, kami pada kesempatan ini mohon maaf daripada pelayanan kami yang belum mungkin kepada keseluruhannya Anggota Komisi IV DPR RI yang pada saat ini sudah menghubungi dan menyampaikan kepada kami untuk kegiatan-kegiatan dukungan Bansos.

Yang pertama, kami mungkin menyampaikan kepada pertanyaan tadi disampaikan oleh Ibu Luluk tentang bagaimana sih tentang kerja mafia ini sampai saat ini dengan kondisi COVID ini apakah masih ada. Saya secara jujur sampaikan masih, jadi memang mafia ini tidak pernah takut sama COVID. Justru memanfaatkan COVID itu untuk dia bekerja lebih keras, maka lawan kita juga harus keras. Memang Pak, permasalahannya saya ini bukan lagi Polisi apalagi bicara Kabareskrim. Saya juga sudah menemukan kegiatan-kegiatan mafia, bukti-bukti mafia itu bekerja dan sudah saya tindaklanjuti dengan saya memberikan kepada aparat penegak hukum karena setiap kali kegiatan kita itu selalu didampingi salah satunya adalah Satgas pangan. Sampai hari inipun masih terjadi, apapun yang dilakukan oleh Bulog itu selalu kita diganggu oleh kelompok-kelompok mafia ini Pak. Ini memang kita sulit manakala kita tidak ada sinergi pemahaman Bersama untuk menghilangkan mafia. Jujur sampai hari ini juga masih ada Pak.

Yang kedua, tentang penyerapan gabah dan beras. Kita memang untuk tahun ini, itu kita mengutamakan justru memang gabah. Karena kita lebih aman menyimpan gabah dari pada beras. Persoalannya kemarin yang beras itu Bu, memang yang kita butuhkan secepatnya, maka kita menyerapnya dalam bentuk beras supaya bisa kita segera salurkan. Karena tidak di semua daerah itu siap mesin penggilingan dan ini akan sedang kita rintis Bu. Jadi nanti ke depan Bulog itu akan membangun seperti mesin-mesin penggilingan, termasuk setiap gudang nanti ada *rice to rice*, sehingga standarnya dari beras dari Bulog itu bila mau dikeluarkan dari Gudang harus melalui proses *rice to rice*. Ini sedang kita bangun di seluruh Indonesia, sehingga *next Insha Allah* tidak akan lagi ada beras jelek yang ada dari Bulog, yang dikeluarkan oleh Bulog. Nah, ini yang sudah kita lakukan.

Kemudian yang mengenai bagaimana untuk kita mencari terobosan-terobosan penyaluran Bu, dengan sekarang Bansos Rastra tidak ada lagi dan yang lain-lainnya, termasuk sekarang bagaimana supaya ini kita tidak juga ketergantungan Pemerintah. Yang pertama, tadi juga ada pertanyaan kenapa Bulog tidak menyerap secara banyak malah jumlahnya banyak komersial dari pada CBP atau PSO. Memang kalau kita bicara PSO, kita ditentukan penyerapannya, harganya dan ketentuan-ketentuan lain sehingga kita tidak bebas. Ini juga akan merugikan petani bilamana di situ harganya naik, keinginan petani bisa dibeli, Bulognya tidak bisa karena dibatasi itu.

Oleh sebab itu, kita mengambil langkah yaitu kita menyerap dengan bentuk komersial. Jadi kita tidak batasi, kita sesuai dengan pasarnya. Nah, ini untuk apa Bu? ini adalah satunya untuk kegiatan kita komersil. Di mana seperti yang lalu saya sampaikan bahwa Bulog ini sudah memproduksi beras komersial yang sudah beredar adalah 50 merk beras komersial yang beredar

umum yang produksi Bulog. Banyak orang yang tidak tahu kalau itu produksi Bulog. Kita ingin membuktikan bahwa Bulog itu bagus berasnya, harganya murah. Nah, ini sudah kita lakukan baik itu komersial premium maupun medium. Nah, ini sudah kita lakukan. Dengan kita juga membangun system Bapak dan Ibu sekalian, sistem bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan mudah. Sudah lama kita lakukan dan kita sudah membuktikan belanja *online* yang melalui Bulog itu cepat, murah dan sampai di rumah para pemesan. Ini yang sampai sekarang bertahan itu adalah dari pegawai BNI, BRI itu sudah mengambil dari kita semua. Dan sekarang beberapa di kewilayahan Pemerintah Daerah juga mengambil ini semua melalui sistem ini.

Nah, kemarin kita membuktikan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa saya sudah melaporkan hal ini kepada Pak Presiden, sehingga dulu saya sampaikan kepada Bapak Presiden, "Pak, Bansos Rastra atau bantuan apapun dari program Pemerintah yang mulai Bulog, *Insha Allah* tidak ada lagi mata rantai yang Panjang, memberi peluang dari pada mafia-mafia bermain". Ini sudah kita sampaikan dan kemarin Pak, kita buktikan di pandemi COVID-19 ini di mana bantuan sosial yang menjadi program Pemerintah yang waktu itu Bapak Presiden menyampaikan kepada saya untuk bisa melaksanakan ini dengan waktu yang singkat. Betul tidak kalau yang disampaikan oleh Bulog itu *door to door*. Saya sampaikan "Betul Pak", ini juga orang masih ragu. Bapak Presiden sekali lagi menyampaikan kepada saya waktu itu "Pak Buwas betul tidak Bapak Buwas mampu untuk menyampaikan *door to door*". ini yang saya mau program adalah 1,4 juta KPM dalam waktu dua minggu "bisa enggak Pak Buwas?" saya jawab "bisa Pak". "Yakin Pak Buwas?" "yakin Pak", saya bilang.

Kemudian kami lakukan Bapak dan Ibu sekalian. Dalam waktu dua minggu kami menyalurkan bantuan Presiden melalui Mensos itu di Jabotabek 1,4 juta KPM dan itu selesai dalam waktu dua minggu, *door to door* Pak, kecuali yang jumlahnya kurang karena daftar namanya berbeda yang kita terima dengan kenyataan di lapangan. Namun demikian, juga kita tetap penuh Pak, walaupun itu dadakan umpamanya satu RT ada tambahan nama yang lima orang di luar itu kita sudah siapkan dan kita langsung distribusikan dan kita koordinasi dengan Mensos, sehingga itu tidak ada masalah Pak.

Yang kedua, kita diperintahkan untuk menyalurkan lagi di dalam waktu dua minggu di Jabotabek 1,8 lebih hampir 1,9 juta KPM di Jabotabek. Dalam waktu juga dua minggu kita selesaikan juga Pak, tidak ada komplain apapun. Bahkan banyak juga kalau dikaitkan dengan mafia, mafia berjuang untuk bisa bagaimana Bulog itu tidak bisa eksis. Maka ada kejadian-kejadian di perjalanan itu yang di mana beras Bulog itu dibuka, ditukar dengan beras jelek, beras yang banyak kutunya dan bergumpal-gumpal terus diviralkan bahwa itulah beras Bulog.

Nah, kita sudah kerja sama dengan Satgas Pangan dan itu sudah kita serahkan kepada penanganan dengan hukum, ini sudah ditangani. Banyak juga Bapak dan Ibu sekalian, yang menghalangi Bulog supaya Bulog tidak eksis dan citranya terus negatif. Nah, ini kita lakukan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita sudah membuktikan. Oleh sebab itu, kemarin juga saya

sampaikan kepada Pak Mensos bahwa kita siap untuk penugasan berikutnya. Kita siap dengan penegasan berikutnya yang waktu Ratas itu kita akan dapat penugasan Pak, untuk 6 bulan kedepan tadinya 900 ribu ton. 900 ribu ton yang harus kita salurkan untuk seluruh Indonesia, yang pada akhirnya sekarang 10 juta masing-masing KPM itu seluruh Indonesia 15 kg. Kita sudah siap Bapak dan Ibu sekalian, karena memang kami sudah menyiapkan semua di seluruh Indonesia dengan standar kita, yang tadi kami sampaikan. Kemarin kami cek sendiri ke lapangan, kami *random* di beberapa lapangan di wilayah kami, semua kita sudah siap untuk menyalurkan itu. Hanya sampai sekarang memang hitam putih-nya belum ada penugasan yang 450 ribu ton.

Kami ingin kepastian Bapak dan Ibu sekalian, tentang penugasan ini. Kenapa? Kami bisa menghitung yang pasti bahwa stok yang kami keluarkan dengan harus kami ganti itu berapa banyak, karena tadi kami harus berhitung Pak, dengan dana yang kita keluarkan, dengan kepastian beras ini keluar, karena jujur saja Pak, kalau tadi ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana dengan penyerapan, dengan penyaluran hulu dan hilirnya. Memang tidak seimbang sampai saat ini kita hanya dihantui dengan permasalahan-permasalahan itu. Karena kita berusaha Pak, kalau tadi kenapa targetnya Bulog tahun lalu 1,8 kenapa hanya penyerapan 1,2 sekarang pun demikian. Yang pertama, saya jawab memang kami tidak punya kepastian Pak. Begitu kita rugi Bulog pun yang dimaki-maki, begitu ada beras karena kerusakan bukan karena kita penyebabnya, karena tidak digunakan dan pembatalan penggunaan sedangkan beras itu umurnya terbatas. Ada busuk begitu 20.000 ton busuk dan harus kita musnahkan itu mutlak harus Pak, ramai yang disalah Bulog lagi.

Karena sampai hari ini tadi juga Bapak Budhy disampaikan kondisi gudang kita seperti di Cianjur di mana itu tidak layak. Memang Pak, kalau saya mau jujur sekarang kita ini tidak punya gudang yang khusus beras, tidak ada Pak, dari Sabang sampai Merauke belum ada. Jadi gudang yang ada di Bulog itu hanya sekedar Gudang. Tapi sebenarnya tidak masalah karena kalau beras itu langsung digunakan, tapi begitu ini digunakannya lambat 6 bulan baru digunakan ini sudah *cost* tinggi Bapak dan Ibu sekalian.

Ada teknik saya menemukan dan kemarin kami coba Pak, ada teknik menyimpan beras dengan sistem Kokon. Itu satu tahun sudah kita simpan dengan sistem itu, kita labkan, kita bongkar satu tahun kita lab itu tidak ada turun mutu sedikitpun. Ini hasil pengecekan di lab, tapi *cost*-nya mahal Pak, jadi tidak imbang kalau kita kita gunakan itu. Maka kuncinya tetap bagaimana hulu dan hilir-nya itu berjalan. Saat ini Pak, CBP ini jujur saja Pak, CBP ini justru ancaman buat Bulog Pak. Di satu sisi kita ingin menyerap dalam negeri mempertahankan stok beras untuk CBP, tapi di sisi lain tidak ada jaminan bahwa beras ini akan digunakan oleh Pemerintah. Sedangkan ancaman kerugiannya sudah pasti Bulog. Tadi seperti begitu kita sudah menggunakan, sudah kita salurkan melalui prosesnya dan diaudit dulu, baru kita tagih kan kepada negara itu ada yang sampai hampir dua tahun belum dibayar Pak, tadi nilainya lebih dari Rp2 triliun. Bunganya yang tanggung jawab siapa Pak? Bulog. Nah, inikan jadi beban kami Pak.

Di sisi lain kami kalau merawat ini dengan beras yang lama Pak, ini juga pasti tidak mungkin Pak, *cost*-nya akan tinggi. Nah, saya sudah sampaikan kemarin juga kepada Anggota hasil evaluasi kami Pak, para direksi. Ini mulai ada ancaman kembali Pak, dari yang 20 ribu ton yang kemarin. Rusak Pak, tapi kalau kita pertahankan terus Pak, ini *cost*-nya tinggi dan berbahaya Pak.

Nah, mengenai kondisi gudang Pak, sebenarnya Pak, dengan posisi kita menyimpan yang lama di gudang kami, ini ancaman untuk masalah kualitas luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? kutu-kutu ini bertelur meninggalkan telur banyak di gudang-gudang kita di seluruh Indonesia. Dan kutu ini bisa terbang sampai 400 meter dari lokasi kutu ini. Ini sudah kita lakukan penelitian, sudah kita evaluasi. Jadi kalau yang disini difumigasi kita basmi hamanya, hamanya disini sudah bersih begitu kita buka kutu dari gudang lain masuk. Jadi ini terus-menerus Pak, itulah ancaman yang ada di kita. Maka saya harus bilang kalau fumigasi ini harus secara menyeluruh, tapi berapa biayanya kalau kita harus fumigasi seluruh Indonesia. Ini akibat kenapa Bapak dan Ibu sekalian, karena beras yang kita simpan terlalu lama. Jadi ini kutu-kutu bertelur dan meninggalkan anak-anaknya menetas dan terus berkembang. Nah, ini jadi permasalahan.

Kemudian Bu, saya sudah memberikan solusi banyak sekali bahkan saya sudah koordinasi juga ya kalau tadi saya harus *entrepreneur*. Sebenarnya sudah Pak, mungkin di sisi lain kalau saya dibilang galak, kalau untuk penegakan hukum, untuk pelanggaran saya pasti galak. Tapi kalau untuk kebaikan saya mungkin orang yang termasuk kelompok baik. Nah, tadi Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah pernah bicara dengan TNI/Polri bagaimana TNI/Polri itu menggunakan beras dari Bulog, karena saya sudah jamin kualitas beras. Panglima TNI/Kapolri setuju, pada saat itu Kapolrinya adalah Bapak Tito. Sudah dihitung Pak, setuju. Persoalannya nilai yang diberikan anggaran untuk membeli beras di TNI/Polri tidak memadai, karena yang diberikan hanya Rp7.000 di TNI/Polri untuk membeli beras, sedangkan beras kita Rp9.450. Jadi kekurangannya Rp2.450, tidak mungkin TNI/Polri nombok. Tapi faktanya kenyataannya prajurit-prajurit TNI/Polri itu membeli di pasar umum dengan harga rata-rata Rp12.000 per kilo. Mereka tidak sadar mereka nombok, tapi tidak jadi masalah karena dia tidak tahu.

Nah, inilah yang dulu saya sampaikan harusnya Kementerian Keuangan itu memberikan kebijakan tunjangan menutupi menambah tunjangan itu adalah Rp2.450 sehingga TNI/Polri bisa kita suplai dengan beras. Ini juga nanti akan berdampak kepada produksi pertanian, karena kita menyerap pasti kita bisa keluarkan. Karena kalau saya bilang ke TNI/Polri ini kalau kita layani kita bisa keluarkan secara rutin 1 juta lebih ton itu. Nah, ini kalau bisa kita semangat, karena yang lalu itu kawan-kawan di Bulog ini yang di lapangan bingung. Ini saya serap, begitu saya serap, begitu ada masalah saya yang disalahkan ini. Karena ini sudah di Gudang, terus tidak dipakai.

Ke depan Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengatasi ini maka kami memang sudah mulai melakukan upaya-upaya, bahwa kita akan membuat Selo dan ini sudah mulai proses dalam pembuatan Selo di mana wilayah-

wilayah yang memproduksi beras itu kita serap dengan bentuk gabah. Dan kita punya Selo dan kita juga membangun penggilingan yang modern ya termasuk tadi mesin *rice to rice*, tinggal kita akan mengeluarkan beras itu. Sehingga yakin ke depan itu beras ini akan bagus, tapi kembali tadi ke hilirnya tetap kita berada pada hilirnya.

Mengenai impor Bapak dan Ibu sekalian, memang sampai saat ini saya sampaikan walaupun Bapak dan Ibu sekalian, sudah ada warning tentang pangan. Jujur saya sudah hubungi beberapa negara, yang tadi mereka katanya tidak akan mengekspor beras ke negara lain, tapi sebenarnya kita bisa mendapatkan itu. Kembali persoalan adalah pasti tidak digunakan, kalau hanya kita simpan ini menjadi pelajaran bagi kita yang tahun lalu dimana 2017 kita impor, 2018 tiba barang itu Bapak dan Ibu sekalian, sampai hari tersisa. Dan itu menghambat penyerapan kita juga ternyata, karena gudang kita, kapasitas Gudang kita, kita mau nyerap susah, karena masih ada sisa impor. Sedangkan yang impor ini bukan jelek Bapak dan Ibu sekalian, tapi *taste*-nya berbeda dengan selera orang Indonesia. Jadi kalau kita salurkan begitu saja itu bermasalah, maka harus kita campur dengan beras dalam negeri, supaya *taste*-nya bisa diterima oleh masyarakat kita. Nah, ini masalah juga Bapak dan Ibu sekalian.

Nah, ini kalau saya bicara juga tadi kalau kita penyerapan Pak, dengan dana komersial itu bunga kita sudah berat sekali Pak. Jadi Bulog kalau dihadapkan dengan itu, tidak pernah untung Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita rugi terus ya karena penugasan, tapi tidak pernah dilihat dari penugasan itu. Sekarang kalau bicara mafia Bapak Ibu sekalian, PAJALE itu kewenangan Bulog, betul kami sudah berusaha tapi begitu kita mau impor tidak bisa, harus melalui Rakortas dan ditentukan dibatasi, maka mafia ini bekerja. Contoh sampai hari ini kita maunya ada kebutuhan daging di mana dulu penugasan hanya Bulog yang bisa mengimpor daging kerbau dari India. Kita sudah berupaya dan disana sudah *clear* betul. Dan dua tahun berturut-turut kita melaksanakan itu, hanya mampu memang penyerapannya 80.000 ton dari penugasan 100.000 ton. Karena dulu saya sudah mulai mengantisipasi dengan kegiatan mafia-mafia ini, sehingga kita bisa menguasai itu. Sekarang mafia itu bekerja dan mereka mendapatkan jatah untuk melawan Bulog, yaitu 70.000 ton itu yang dikelola oleh mafia-mafia daging ini, sehingga itu yang akan melawan Bulog. Sudah tinggal setengah tahun tidak mungkin kita bisa menyerap dengan jumlah 80.000 ton, tapi kuotanya 170.000 ton, tidak mungkin. Nah, ini sudah merupakan pekerjaan-pekerjaan yang menghambat dari pada Bulog.

Gula juga gitu Bapak dan Ibu sekalian, kalau swasta yang izin 5 menit jadi, Bulog dua minggu tidak jadi-jadi. Itulah prosedur...

KETUA RAPAT:

Tadi sudah saya sampaikan kalau Bulog jalan biasa, jalannya kalau mau ke Cikampek lewat Bekasi, lewat Purwakarta, lewat mana. Kalau mereka jalan tol langsung, jadi aku sudah pahamlah.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Jadi kalau Bulog negara yang mengajukan itu sulit sekali, bahkan ini pegawai saya, staf saya itu nunggu di kantornya yang bersangkutan itu, bahkan sampai ditinggal pulang nunggu. Jam 12 malam ditungguin di rumah juga tidak di tandatangan. Ya mohon maaf yang saya tugaskan ini mantan anggota TNI berpangkat bintang 2 dulunya, tidak dianggap ini sangat keterlaluan fakta.

KETUA RAPAT:

Ya, kalau cuma datang tok ya susah Pak.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Ya memang itu Pak Ketua, kami kan tidak punya kewenangan kesitu, karena kita penugasan untuk stabilisasi. Bahkan tadi disampaikan Pak, gula begitu kita sudah setengah mati dapatnya Pak, kita dapat pun dengan upaya-upaya susah, ya kita kayak menggarami lautan, karena jumlah kecil. Kita sebar diseluruh Indonesia sebentar hilang, kita sebar keseluruh Indonesia sebentar hilang. Yang kedua ini juga demikian Bapak dan Ibu sekalian, karena saya buktikan apa yang saya sampaikan kepada Pak Presiden bahwa saya bilang Pak Presiden waktu itu "Bapak Buwas, bisa tidak Bapak Buwas jual gula murah?" "bisa Pak, asalkan Bapak berikan penugasan kepada saya". "Berapa kira-kira harganya Pak Buwas?" "Ini sudah Rp20.000, Rp17.000 per kilo, ba Buwas bisa jual berapa?" "Rp 10.500", saya bilang gitu, kaget beliau. "Tidak mungkin", "Mungkin Pak, karena untuk negara", betul Pak.

Terus yang terakhir karena saya masih punya tinggal sedikit beliau cek sama saya berapa harga yang dijual pada Bulog, pokoknya sampai kepada konsumen Sabang sampai Merauke Rp12.500, Betul Pak dicek di Merauke, di Wamena Pak, itu gula yang dari Bulog Rp12.500 sampai konsumen. Itulah bukti yang kita lakukan tapi ya amunisi kita terbatas, karena kita diancam kita hanya

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pimpinan, ijin interupsi Pimpinan, Bapak Budi Djiwandono Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Budi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Budi Waseso yang kami hormati.

Ijin sedikit saja Pak, berulang kali di dalam rapat ini kita mendengarkan *terminology* mafia Pak, mafia pangan, apakah itu bergerak menghalangi kebijakan atau kebijakan Bapak atau bermain di banyak hal. Pak, boleh tidak Pak, kami ini di Komisi IV DPR RI ini mendapat pencerahan Pak. Kita sering mendengar *terminology* mafia, tapi kita tidak bisa melihat wajah ataupun nama dari mafia-mafia ini. Kita diinfokan saja Pak, ini loh indikasi-indikasinya, oknum-oknumnya gitu loh Pak.

Terima kasih Bapak Budi Waseso.

KETUA RAPAT:

Bapak Budi, kalau mau nanya, mau melihat, mau tahu silakan datang ke lapangan Banteng.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Saya kira saya sudah tahu Pak, tapi saya tidak mungkin, justru kalau saya buka disini mereka hilang nanti. Nanti kesulitannya dari pada penegak hukum sendiri. Tapi yakin Pak, ini sudah saya serahkan kepada penegak hukum.

Bapak dan Ibu sekalian.

Tadi ada pertanyaan mengenai apa yang pernah saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, apakah benar Pak Buwas itu akan memecat 100 karyawan Bulog. Potensinya iya, karena ini orang-orang yang sudah sulit dirubah, berpikinya sudah luar biasa. Justru ini bagian dari mafia itu yang ada di internal Bulog. Kemarin saya evaluasi terakhir, maka ini yang harus saya sikapi, saya sedang minta bantuan kajian hukum dari Polri tentang permasalahan ini. Jadi saya minta bantuan menganalisa, karena ini memang harus Bapak dan Ibu sekalian, harus kita lakukan. Ini bukan berarti saya galak bukan, karena ini tidak bisa ditoleransi lagi, karena ini yang membebani dari perusahaan itu sendiri Pak. Sekarang perusahaan ini terbebani oleh manusia-manusia yang seperti itu, tapi tidak seluruhnya Pak, justru yang kecil ini harus segera kita bersihkan, karena kalau tidak nanti menular, jadi penyakit menular.

Jadi kembali Pak, mengenai stok apakah saya perlu impor kalau tidak. Ini tergantung kebijakan Pemerintah tentang penugasan Bulog. Kalau saya bilang, kalau pasti saya dikasih 900 ribu ton untuk mengeluarkan itu sampai Desember, maka saya untuk mempertahankan 1,5 juta ton yang ada di Bulog, maka saya harus mendatangkan 500 ribu ton, itu kalau pasti Pak. Tapi bilamana tidak Pak, ini hanya 450 ribu ton tidak perlu Pak, karena stok kami dengan penyerapannya juga masih banyak. Sekarang ini kita menyerap terus yang rata-rata sehari 7 sampai 10.000 ton. Jadi kita masih kuat Pak, artinya kalau dari penyerapannya. Maka saya bilang tergantung dari pada penugasan kepastiannya. Kalau pasti Pak, kami juga berani, pinjam uang pun kami berani tapi pasti dipakai, sehingga kami bisa kalkulasi bunganya dipakai kita

harus berapa membayarnya, ini kembalinya kapan. Ini sudah ada kepastian Bapak dan Ibu sekalian.

Data-data tentang panen Bapak dan Ibu sekalian, memang penyerapan kami sudah punya pemetaan dari wilayah-wilayah yang memang memproduksi dan mana yang surplus. Kebijakan kami yang surplus itulah kita ambil semua Pak, kalau bisa sebanyak mungkin. Sehingga nanti kita diskusikan kepada daerah-daerah yang defisit. Ini sudah Pak, sekarang sudah berjalan. Jadi kita berpikir bahwa jangan sampai ada satu wilayah yang kekurangan beras yang kemarin beberapa wilayah yang defisit juga sudah kita dorong untuk kesiapan cadangannya. Termasuk kesiapan kita manakala untuk penugasan yang bahasa sastra untuk 10 juta KPM seluruh Indonesia, ini sudah siap Pak.

Kalau soal tadi ada pertanyaan, tanggapan saya tentang holding pangan Pak, apakah ini dari Bulog. Ya kalau kami sih bagaimana tergantung keputusannya. Apakah *holding* pangan itu lebih baik atau tidak ya tergantung Pak. Tapi selama ini yang penting bagi saya adalah hulu dan hilirnya itu memang benar-benar pasti itu, kalau tidak ya kita sulit Pak. Saya sudah buktikan Bapak dan Ibu sekalian, maka saya waktu itu pernah menyampaikan juga Bulog ini ibarat di sisi dua mata uang, bagaimana Bulog ini satu sisi adalah penugasan, di sisi lain ada di kewajiban komersil. Kita komersil di untung tapi dikala kita untuk menutupi PSO hilang. Tadi menggarami garam di lautan, jadi nggak ada artinya apa-apa Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau kami dilepas untuk komersil betul kami pinjam berapapun berani Pak, karena saya yakin semakin-yakinnya walaupun saya bukan pedagang, saya semakin yakinnya saya bisa menguasai beras di Indonesia, apalagi komersial Pak. Karena saya yakin tidak ada pengusaha yang punya gudang di seluruh Indonesia gudang beras dengan kekuatan besar.

Nah, kalau ada jaminan itu saya lebih baik bicara komersial karena kalau bicara komersial Pak, dikala nanti saya serap mungkin bisa 3 juta ton beras komersial dikala negara membutuhkan tinggal saya serahkan negara. Tinggal negara membayar selisihnya saja, mungkin lebih aman jadi tidak ada tanggungan bunga, karena saya selalu akan jualan komersial. Nah, ini yang saya harapkan.

Mengenai bagaimana menghadapi, saya tidak jadi mendapatkan dana talangan. Saya sih tidak pernah mau memaksa Pak, karena memang itu kebijakan negara, Pemerintah. Yang tadi disuarakan karena saya juga ditanya berapa kebutuhan untuk penyerapan. Ya paling tidak saya mendapatkan Rp10 triliun, karena maksud kami cara berpikirnya Pak, CBP inikan berasnya Pemerintah, ditugaskan oleh Pemerintah, harusnya dibiayai oleh Pemerintah, mudahnya begitu Pak. Nah, kalau toh ini ada tidak Bulog di sini ada Kementerian Pertanian. Saya sampaikan juga kepada Pak Menteri Pertanian, "Bapak yang mengajukan karena program penyerapan itu ada di Bapak juga dari pertanian hasil pertanian". Nah, beras ini milik negara mungkin dibelinya oleh Menteri Pertanian, saya tidak tahu nanti regulasinya bagaimana.

Kita hanya menerima untuk menyimpan, merawat atau mendistribusikan, terserah nanti dari negara. Sehingga Bulog ini tidak terbebani lagi Pak, ini sekarang karena menganggap beras ini bukannya tanggung jawab Pemerintah, apalagi dari Menteri Keuangan hanya selisihnya nanti yang diganti. Dan bilamana sudah dikeluarkan baru diganti, kalau tidak dikeluarkan siapa yang ganti Bapak dan Ibu sekalian. Kerusakan pada lempar-lempar handuk, bukan tanggungjawab kita, bukan tanggungjawab ini, kembali lagi ke Bulog, kan tidak seperti ini Pak. Dan sekarang ancamannya itu.

Jadi kalau kita impor lagi juga seandainya butuh Pak, memang butuh betul-betul kita impor jaminannya apa Pak? yang tanggung jawab siapa. Karena pada akhirnya seperti pengalaman kita yang lalu Pak, beras ini sisa dua tahun Pak, harusnya tidak layak pakai. Tapi dengan sistem kita menyimpan Kukon itu beras ini layak Pak, masih layak digunakan. Tapi *cost*-nya tinggi, mahal Pak. Nah, apakah kita harus bertahan seperti ini. Nah, inikan jadi pertanyaan juga manakala itu tidak digunakan oleh negara, pasti rusak Pak.

Nah, bagaimana mengenai persepsi kalau kita rapat dengan Kementerian-Kementerian, memang saya rasakan memang belum sinkron antara kepentingan-kepentingan atau pemikiran-pemikiran di beberapa menteri yang ada hubungan dengan pangan. Sehingga ibaratnya kita tidak pernah nyambung itu, kita ditugaskan seperti tadi Bapak bilang kenapa Bulog tidak menyerap jagung. Wah kita nyerap Pak, secara mandiri. Jadi di produksi jagung di wilayah itu kita sarap dengan Mandiri, tapi kita bicara komersial Pak, karena memang uangnya komersial. Kalau penugasan kita ada harapan bahwa ada pergantian dari negara. Nah, kalau kita impor itu masalah juga sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi kalau kita bicara jagung, kedelai pun demikian Bapak dan Ibu sekalian, karena sekarang masyarakat pengrajin tempe itu yang dibangun lebih mudah pakai kedelai impor dan segala macam. Jadi sudah tidak mau lagi lokal, padahal kedelai impor hasil penelitian dari LIPI, IPB kualitasnya lebih bagus daripada impor kedelai lokal itu. Kadar vitaminnya dan segala macam lebih bagus local daripada impor. Tapi memang yang image dibangun supaya kita ketergantungan pada produksi luar Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga ini yang dipertahankan supaya kita impor, karena kalau impor itukan jujur saja pasti ada *fee*-nya, ada nilai keuntungannya. Nah, kita tidak berpihak pada petani, sehingga petani sekarang sudah tidak ada lagi yang semangat untuk Bertani, karena tidak ada jaminan untuk dibeli.

Bapak dan Ibu sekalian.

Kemarin kami laporkan ada satu wilayah, beberapa wilayah yang dulu tidak pernah tersentuh sama kita karena itu dikuasai salah satunya sama tengkulak-tengkulak. COVID ini membuat tengkulak juga kelabakan sebenarnya, karena armada dia hilang karena takut sama COVID. Kita masuk ternyata petani-petani itu terima kasih dengan Bulog Bapak dan Ibu sekalian, karena apa? harganya lebih tinggi daripada yang dibeli oleh tengkulak-tengkulak itu. Dan kita berhasil dalam jumlah besar kita menyerap wilayah itu

untuk gabah. Hari ini juga kita masih menyerapkan Pak, jalan terus hari ini. Yang dulu memang bukan dikuasai oleh Bulog. Nah, ini kesempatan Bapak dan Ibu sekali, dan saya membangun kepercayaan itu kepada petani-petani. Dan mereka mengatakan "Pak jaminan untuk kami Pak, bahwa Bapak selalu menyerap", saya sampaikan "*Insha Allah*", karena tempat itu sekarang saya masih pinjam gudangnya Pemda yang selama ini tidak dipakai, tapi tempat itu akan saya bangun untuk penggilingan, karena kelemahannya tidak ada penggilingan, penggilingannya tradisional. Jadi kalau digiling dengan cara tradisional, maka keluarannya medium. Jadi kasihan petani jual beras juga harga murah, maka harus kita yang ambil alih. Nah, ini beberapa tempat sedang kami pelajari Pak. Dan dalam waktu ke depan ini akan kita bangun Pak, sarana prasarana itu.

Penugasan-penugasan BUMN memang diantaranya Pak, kita memang terbelenggu dengan penugasan yang ditentukan Pak. Saya kan tidak ahli di bidang sekali lagi di bidang per-Bulog, bidang pangan karena sebelumnya memang bukan di sini. Tapi saya tahu Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kenapa gula mahal, kenapa bawang putih mahal, kenapa kedelai mahal, dan yang lainnya mahal Pak, ini karena dibuat mahal Pak. Karena pungutan-pungutan itu, ini terang-benderang Pak, tidak perlu saya sebutkan semua sebenarnya gampang melihatnya. Siapa yang prioritas-prioritas itu jelas kok, kelompok siapa jelas, sangat-sangat jelas, terbuka. Saya sudah pernah mancing kok Pak, begitu Bulog minta kuota tidak dikasih, begitu kuota saya kasih orang lain dikasih Pak, dalam waktu relatif tidak sampai satu hari di tangan tangan yang kuotanya untuk Bulog itu diserahkan ke orang lain. Berapa yang diberikan kepada itu saya tahu persis, karena orang itu tidak berani bohong sama saya, rekamannya ada.

Nah, kalau seperti ini Pak, berarti kita membiarkan konsumen ini selalu dibebani dengan harga mahal dari proses tadi Pak, pungutan-pungutan yang terus sampai hulu dan hilirnya. Maka beras yang tadinya harusnya murah jadi mahal, gula yang harusnya murah jadi mahal, kan kita tahu kalau impor itu sampai di Indonesia berapa sih. Gula kristal putih itu murah Pak, kita bilang bawang putih murah Pak, paling tidak jauh, tidak sampai Rp10.000 per kilo bawang putih sampai di Indonesia. Tapi sampai konsumen Rp35 ribu, Rp40 ribu inikan kebangetan Pak, tapi karena pungutan-pungutan itu. Ini gampang sebenarnya kalau mau kita memang niatnya memang mau tertibkan dan kita mau menciptakan bahwa masyarakat konsumen itu mendapatkan segalanya dengan murah.

Bapak dan Ibu sekalian.

Kami juga sudah menjajaki bahwa pangan jangan hanya bicara beras, karena ada sugu, ada terigu, ada jagung dan lain-lainnya ini sudah beberapa tempat wilayah kami Pak, di Bulog di wilayah itu sudah mulai menyerap Pak, termasuk sugu untuk kepentingan cadangan pangan. Jadi di masyarakat-masyarakat yang membutuhkan sugu di tempat yang disitu wilayah kita sudah menyerap sugu dan itu untuk kebutuhan masyarakat di sekitar itu.

Nah, seperti pernah kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Sebenarnya tepung singkong itu, itu masih kekurangan kita kan ternyata masih kekurangan 1,5 juta ton impor dan ini dipertahankan untuk tetap impor 1,5 juta ton per tahun. Padahal potensi kita untuk ekspor tepung singkong itu besar Pak, karena saya sudah pernah mendorong ini terjadi di wilayah dinas saya pada saat itu, saya tugas di satu wilayah Kapolda saya bilang "ini wilayah bisa ditanami singkong", akhirnya ada investor yang mau Pak. Hari ini berkembang di tempat itu, tapi dipersulit untuk menjualnya. Bahkan dia punya pasar ekspor pun dihambat supaya dia tidak ekspor, ini fakta supaya impornya tetap masuk. Nah, ini kan seperti demikian ini Pak, akhirnya kita juga membunuh petani yang tadinya dia semangat untuk nanam singkong, yang tadinya lahan tidur akhirnya tidur kembali, karena semangatnya tidak ada lagi para petani-petani itu. Padahal dulu itu Pak, petani-petani itu semangat sekali. Demikian juga dengan petani tebu, petani yang lain-lainnya.

Jadi mengenai Bapak dan Ibu tadi, mengenai Surat Edaran yang dari Menteri Sosial zamannya Pak Agus itu memang nggak bisa dipedomani Pak, karena Surat Edaran. Surat Edaran itu boleh dilaksanakan boleh tidak, memang dibuat begitu Pak, sehingga dikuasai oleh kelompok-kelompok itu semua. Jadi kita bisa buktikan kok Pak, kemarin kalau saya sampaikan bagaimana nilai yang didistribusikan oleh Bulog silakan dievaluasi, dinilai, transparan kami. Ternyata kita tidak mengurangi sedikit apapun termasuk timbangan kualitas, harga tidak kita kurangi. Dibandingkan dengan yang disupply dari yang lain, itu sangat jauh, kualitasnya juga sangat jauh. Yang dinyatakan *premium* Pak, itu ternyata berasnya justru di bawah medium karena broken-nya itu sampai 40%. Itu bukan medium lagi bahkan kualitasnya buruk, tapi ya itu yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian.

Jadi sekarang Bapak dan Ibu sekalian, saya tetap berupaya tapi di sisi dalam untuk menegakkan ketertiban, kami memang memang harus melakukan hal yang tegas, karena mafia itu bisa bekerja juga pasti ada bantuan dari internal. Sederhana kok Pak, saya baru omong-omongan saja, saya nilai di internal saya kan gampang Pak. Saya baru omong-omongan saja sudah nyampe di luar kok, itu baru omong-omongan belum ada keputusan sudah sampai, ada rencana ini padahal belum. Terus strateginya mafia sudah buat, ini-ini bahkan mereka sudah bilang kalau sampai ada Bulog begini kita hantam lewat sini, kalau ada Bulog nanti kebijakan ini kita hantam lewat sini, saya tahu persis Pak. Karena apa? pembicaraan kegiatan mereka itu terdeteksi oleh saya, termonitor oleh saya. Karena mereka lupa memang jaringan-jaringan ini lupa kalau saya ini pensiunan polisi dan mantan Kabareskrim. Narkotika saja terdeteksi sama saya, apalagi soal urusan gitu gampang banget itu.

Cuman persoalannya yang tidak menguntungkan saya sudah tidak punya kewenangan dalam penegakan hukum, itu saja persoalannya. Jadi mereka masih bisa menari-nari, tapi ya tidak apa-apa. Tapi saya tetap berjuang untuk itu, karena kalau tidak kasihan masyarakat, kasihan petani, kasihan konsumen, karena semua jadi mahal. Tadi kan Bapak bilang warga sampai hari ini saja gula di Lampung masih Rp19.000 padahal Lampung itu sumber gula. Sama di Banten juga begitu, sumber gula tapi kok mahal. Ya

memang dibuat mahal Pak, memang yang menguasai pasarnya kan siapa kan jelas Pak, kan mudah sekali. Kalau kita bicara jejaring mafia ya mereka itu bagiannya, bagian dari itu.

Bapak dan Ibu sekalian.

Dengan masalah COVID ini saya tetap Bapak dan Ibu sekalian, kami harus tetap bisa melaksanakan tugas secara maksimal maka sistem yang kita bangun tadi online, sehingga kita bisa kita buktikan bahwa masyarakat tidak perlu berduyun-duyun datang cukup tinggal di rumah datang ini barang dari kita. Tidak sama sekali kita mainkan bahkan saya punya kebanggaan dimanmana kami bisa berbuat untuk masyarakat itu, karena masyarakat yang miskin dan ini kita buktikan. Tapi kan disatu sisi masih didengungkan bahwa ini Bulog tidak benar, nah itu demikian, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian.

Nah, memang ada upaya-upaya untuk menghambat Bulog supaya bisa berkualitas salah satunya menghambat beras Bulog keluar, karena kalau dengan ini tidak didistribusikan akan rusak. Nah, kalau rusak pasti swasta bermain dan swasta punya kewenangan untuk menetapkan harga. Kalau kita kan sudah dibatasi dengan negara.

Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, kemarin tanggapan penyaluran Bansos yang untuk Jabodetabek dari masyarakat penerima semua mengatakan positif dan berharap ini bisa terus dilanjutkan. Kami hanya penugasan masalahnya Bapak dan Ibu sekalian. Tentang kualitas juga kami sudah jamin karena Bapak dan Ibu sekalian, bisa melihat kalau untuk di DKI bisa dilihat bahwa kita ada di gudang kita yang di DKI, yaitu di Kelap Gading kita punya mesin *rice to rice*. Disitu pasti Bapak dan Ibu sekalian, begitu beras itu melalui proses yang melalui 5 fase proses itu, maka beras itu jadinya bagus. Tidak mungkin ada kutu, apalagi telurnya hilang semua, berasnya bagus. Dan kami tidak menggunakan bahan pengawet atau bahan kimia sedikit pun tidak Bapak dan Ibu sekalian. Dengan bukti beras dari Bulog itu walaupun sudah diproses masih bisa ada kutu kalau memang ada yang memasukkan atau kutu bisa nembus. Itu bukti berarti beras kita *clear* dari kimia. Coba beras-beras yang lainnya yang di luar Bulog yang melalui proses bahan kimia pasti kutu tidak akan mau, itu buktinya. Nah, bukan berarti selamanya beras yang ada kutunya itu tidak sehat. Demikian juga dengan daging kalau yang ada ulatnya ada pembusukannya berarti itu normal, tapi kalau yang tidak busuk berarti tidak normal.

Bapak dan Ibu sekalian.

Terima kasih juga Ibu Endang, saya terima kasih atas koreksi Ibu Endang karena memang yang lalu kami juga dapat laporan Ibu Endang karena pelayanan kami kurang bagus kualitasnya. Nah, ini karena perbuatan oknum, oknum ini tidak lagi walaupun kita sudah sepakat bahwa proses itu SOP-nya demikian akan tetapi mereka yang masih berpikir biar saja atau mereka bagian dari mafia supaya ini pencitraannya kepada Bulog negatif, sehingga bisa diambil alih oleh kelompok-kelompok ini.

Bapak dan Ibu sekalian.

Tadi Bapak Sutrisno juga menyampaikan kenapa beras Bulog dipatok Rp10.201 per kilo gram? Memang itu hitungannya yang normal Pak. Itu artinya, kita sudah bisa menyampaikan sampai ke lokasi. Jadi kita patok itu sampai lokasi sehingga kalau Pemerintah itu dari Bulog harus jual Rp9000 kita jual tetap Rp9000 Pak, kekurangannya itu yang kita tagihkan kepada negara atau Pemerintah, maka dipatok disini harganya seperti itu. Kemarin juga seperti itu yang kita sampaikan.

Jadi Ibu Kiki tadi juga saya terima kasih, saya memang kalau ditanya soal ketahanan pangan atau kedaulatan pangan. Memang sekarang ketahanan pangan kalau menurut saya pribadi masih belum yakin kita tahan pangan, karena sistemnya begitu apalagi kita bicara kedaulatan pangan. Nah, kemarin Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah mau membuktikan bahwa Bulog, negara ini sudah bisa ekspor beras itu saya buktikan, bahwa kita sudah kontrak dengan Arab Saudi 100 ribu ton kita ekspor beras ke Arab Saudi beras dalam negeri kita. Harganya bagus lagi kita untung besar, tapi memang mungkin kita belum diperbolehkan sama yang kuasa, karena terus dibarengi dengan COVID-19, sehingga batal karena Arab Saudi *lockdown* kita sendiri juga jadi terhambat.

Termasuk Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita menyerap sekarang belum bisa maksimal yang terakhir ini karena memang salah satunya juga karena ada pengaruh dari pandemi COVID-19. Petani juga ragu, angkutan supir-supirnya juga ragu tapi kemarin sudah saya yakinkan bahkan kita juga kerja sama dengan TNI/Polri minta bantuan bilamana angkutan umum tidak ada maka saya minta bantuan kepada Kapolri dan Panglima TNI supaya TNI membantu angkutan pangan ini. Nah, ini sudah disiapkan tapi *Alhamdulillah* termasuk kemarin penyaluran bantuan sosial ini, yang bantuan Presiden ini yang Jabodetabek tadinya angkutannya juga diragukan Pak. Karena memang sulit Pak, bahkan setiap hari kita bisa mengerahkan 10 ribu truk angkutan. Nah, ini tadinya juga ragu semua tapi saya sudah mencadangkan manakala ini tidak bisa terpenuhi kami sudah minta bantuan dari TNI/Polri. *Alhamdulillah* di Bulog ini ada mantan Polri, ada mantan TNI. Jadi mudah Bapak dan Ibu sekalian kalau kita berkoordinasi dengan TNI/Polri. Ya *alhamdulillah* seperti kemarin Bapak dan Ibu sekalian, kenapa gula, beras di Wamena bisa murah? Karena kita cara kerja kita subsidi silang yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, saya bekerja sama dengan TNI/Polri terutama kemarin untuk angkutan kami langsung melaporkan kepada Panglima TNI. "Bapak Panglima kami butuh angkutan ini untuk berasnya masyarakat di Papua khususnya Wamena, termasuk untuk prajurit-prajurit TNI di Wamena".

Angkutan tidak ada karena memang terbatas, akhirnya Bapak Panglima menyediakan angkutan khusus, yaitu Hercules disana sehingga ini bisa terpenuhi. Ya seperti ini Pak, memang harus sinergi Pak. Saya harapannya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bersinergi untuk kluster pangan ini bersinergi Kementerian-Kementerian yang ada hubungannya dengan pangan ini bersinergi dan kita pemikirannya satu Pak, untuk negeri ini saya kira tidak ada masalah Pak. Sekali lagi saya bisa menjamin Pak, kalau

saya dikasih kesempatan untuk membuktikan itu seluruh pangan satu pintu di serahkan kepada Bulog saya menjamin Pak, pangan ini murah. Saya berani bertaruh karena saya sudah tahu bagaimana permainan itu, bagaimana mekanisme itu, sehingga beban kepada konsumen ini sangat berat. Jadi kalau Bapak Presiden berharap birokrasi dikurangi, keinginan Bapak Presiden bagus tapi pelaksanaannya yang tidak bagus, selalu tidak mau berubah. Kan saya tahu cara mengambilnya uang lebih itu bagaimana, siapa, saya tahu semua Bapak dan Ibu sekalian. Transaksi-transaksi itu, kelebihan-kelebihan itu bagaimana ceritanya saya tahu semua, tidak ngarang-ngarang saya. Tapi kalau memang kita tidak komit kita mau tertibkan itu saya mohon sampaikan, saya akan tunjukkan siapa orangnya. Tapi kalau hanya untuk sekedar tahu kan rusak Pak, tetap saja nanti ganti orang, ganti system, ganti modelnya, ya tidak selesai-selesai Pak.

Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, bilamana ada yang kurang nanti kita bisa sampaikan melalui penyampaian tertulis Bapak dan Ibu sekalian. Lebih kurangnya kami mohon maaf.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Dirut Perum Bulog yang telah menyampaikan jawabannya.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Dari dialog, diskusi, saran dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI sebelum acara ini kita akhiri kami bacakan kesimpulan rapat pada Rapat Dengar Pendapat hari ini.

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Perum Bulog dalam optimalisasi penyerapan gabah/beras sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah/beras. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk memperkuat Cadangan Pangan Nasional dalam menghadapi krisis pangan dan kekeringan, dengan mengutamakan Perum Bulog dalam penugasan penyerapan pangan nasional.

Anggota?

Bulog?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Perum Bulog yang telah menyelesaikan penyaluran Bantuan Presiden selama pandemi

COVID-19. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengembalikan peran Perum Bulog sebagai penyedia dan pendistribusi utama beras dalam program Bantuan Sosial Pemerintah serta penyaluran Natura untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang lalu sudah disampaikan juga, tetapi nampaknya Pemerintah masih agak setengah hati.

Anggota?

Bulog?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran penyerapan dan penyaluran komoditas pangan strategis kepada Perum Bulog dalam rangka melindungi harga di tingkat petani, mengatasi kelebihan hasil budi daya Pertanian Strategis Nasional, dan memperbaiki kebijakan pengelolaan Cadangan Pangan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Anggota?

Bulog?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk memberikan kewenangan yang seimbang kepada Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan pengadaan dan penyaluran komoditas pangan strategis nasional. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri.

Anggota?

Bulog?

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk segera membayar hutang penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Perum Bulog Tahun 2018-2019 sebesar Rp409.812.567.844,09- (empat ratus sembilan miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat koma nol sembilan rupiah) dan

Cadangan Stabilitas Harga Pangan komoditas gula Tahun 2018-2019 dengan total sebesar Rp1.354.363.874.404,00- (satu triliun tiga ratus lima puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat rupiah).

Anggota?

Bulog?

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah untuk memberikan jaminan pemberian keringanan bunga komersial kepada Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan pengadaan dan penyaluran komoditas pangan strategis nasional.

Anggota?

Kalau Bulog lebih setuju lagi pasti.

Bulog?

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melakukan evaluasi atas Harga Penjualan Beras (HPB) yang dilakukan Perum Bulog dengan menghitung kembali selisih harga yang tepat dan sesuai, guna melindungi harga di tingkat petani.

Anggota?

Bulog?

(RAPAT: SETUJU)

Demikian rancangan dan kesimpulan rapat hari ini, apakah rancangan ini bisa menjadi kesimpulan Rapat Dengar Pendapat hari ini?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat hari ini, kami persilakan Dirut Perum Bulog untuk menyampaikan kata penutup.

Silakan singkat Pak.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Yang saya hormati Ketua,

Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Komisi IV DPR RI terhadap Bulog. Kami selalu berharap bahwa Bulog selalu mendapat koreksian utama dan dukungan selama melaksanakan tugas khususnya untuk penyaluran-penyaluran 9 bahan pokok.

Demikian yang bisa kami sampaikan, sekali lagi kami terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Bapak dan Ibu termasuk juga Perum Bulog.

Masih ada peluang untuk mendapatkan penyaluran Bansos, Pemerintah akan menyalurkan 2,7 juta paket kepada petani yang mana sampai hari ini kalau kata Kementerian Pertanian sudah disalurkan tetapi setahu saya dari Kemensos belum mulai.

Itu saja, terima kasih.

Dengan demikian berakhir pula Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan *alhamdulillah* Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.30 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001